Karya
Litera
Indonesia

BERKHIDMAT UNTUK NKRI

Tentang Pendidikan, Keislaman, Kepesantrenan dan Kebangsaan

Pengurus Cabang ISNU Tuban

**ISNU KUAT
NU BERMARTABAT
TUBAN SEJAHTERA**



BERKHIDMAT UNTUK NKRI

Tentang Pendidikan, Keislaman, Kepesantrenan, dan Kebangsaan

Pengurus Cabang ISNU Tuban

Karya Litera Indonesia
2019

BERKHIDMAT UNTUK NKRI
Tentang Pendidikan, Keislaman,
Kepesantrenan dan Kebangsaan

Karya Litera Indonesia
Tuban 2019

Cetakan Pertama, Januari 2019
14 x 21 cm, 108 Halaman
ISBN: 978-602-2546-72-6

Penulis: Pengurus Cabang ISNU Tuban

Editor : Muhammad Rouf
Penyunting : Mutholibin
Layout dan Cover : Dhahrul Mustaqim

Diterbitkan oleh:

CV. Karya Litera Indonesia
Jl. Sunan Kalijaga, Gang Kresna, Kelurahan Latsari
Kabupaten Tuban
HP: 085730630834 / 08563185003
Facebook: Karya Litera Indonesia
Email: LiteraIndonesia99@gmail.com

Bekerjasama dengan:
Pengurus Cabang ISNU Tuban

Cetakan Pertama, Pebruari 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah swt atas segala karunia, rahmat dan anugerah-Nya. Sholawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad saw yang kita senantiasa berusaha untuk meneladani akhlaq mulianya.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) hadir di Tuban dengan tujuan untuk berkhidmat memberikan pengabdian melalui pengembangan Aswaja dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan ummat dan masyarakat, serta berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bangsa khususnya dalam konteks di wilayah kabupaten Tuban.

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi, maka pengurus dan anggota ISNU Tuban diharapkan untuk memiliki sikap dan karakter kemandirian, keikhlasan dan berkolaborasi, serta memiliki kepekaan dan kepedulian atas problematika sosial maupun potensi-potensi di sekitar. Sehingga dengan karakter tersebut, ISNU dapat tumbuh menjadi organisasi yang proaktif sekaligus responsive solutif terhadap kondisi masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan potensi-potensi di Tuban.

Kami memiliki keyakinan bahwa Insya Allah dengan semangat mujahadah dan keikhlasan dalam pengabdian *(wa jaahiduu bi amwaalikum wa anfusikum)* PC ISNU akan dapat, dan seharusnya memang sangat bisa, memberikan kontribusi riil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang adil dan makmur, serta memperkuat Aswaja An-Nahdliyah dan tentunya berpartisipasi dalam mewujudkan Tuban yang sejahtera.

Terimakasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh sesepuh, para kyai dan ulama, Bapak Bupati Tuban dan jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh tokoh masyarakat yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada kami dalam menyusun kepengurusan PC ISNU Tuban masa khidmat 2018-2022.

Semoga kepengurusan kami dapat menjaga amanah menjalankan visi misi organisasi ISNU di Kabupaten Tuban.

Buku ini kami sajikan dengan segala kerendahan hati sebagai rangkaian kegiatan pelantikan dan merupakan bunga rampai pemikiran dari beberapa pengurus PC ISNU Tuban. Semoga tulisan-tulisan disini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua.

Tuban, 03 Februari 2019

Warih Satria Setiawan, ST., MBA.

DAFTAR ISI

Bagian 1

BUTIR CATATAN WACANA UU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN

Oleh:

Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.

Paradigma bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum *(rechtsstaat)* adalah final dan menjadi nilai fundamental bangsa Indonesia. Ketentuan yang gamblang dalam amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan pedoman bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara hukum sendiri mengandung arti bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal senada juga disampaikan oleh Aristoteles yang merumuskan negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Beranjak dari pandangan inilah, tidak sedikit yang berpendapat bahwa pada segala sendi kehidupan bangsa Indonesia haruslah mengedepankan hukum sebagai landasan.

Memang tidak salah, namun tidak jarang mereka yang berpendapat demikian justru tidak secara detail memahami hakekat hukum yang sebenarnya. Bahkan cenderung berpandangan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang dibuat oleh penguasa saja.

Perlu digarisbawahi bahwa tataran pemahaman mengenai hakekat hukum sebenarnya sudah masuk kepada ranah filosofis tentang hukum. Banyak para filsuf yang justru berbeda pandangan mengenai hakekat hukum yang sebenarnya. Maka, teramat kompleks jika dalam kaitan ini, diskursus diarahkan pada pembahasan beberapa perbedaan pandangan filosofis tentang hukum tersebut.

Berkaitan dengan itu, sedikit yang perlu dikemukakan sebagai pembuka dalam tulisan ini adalah pemahaman bahwa hukum tidak hanya kaidah-kaidah tertulis belaka. Lebih dari itu, hukum mencakup pula pada kaidah yang tidak tertulis.

Baik tertulis maupun tidak, keduanya merupakan hukum. Hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* (terj. bebas: di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum). Sifat dinamis dari hukum tersebut dilatarbelakangi perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Maka, dalam tataran pembentukan aturan hukum, para pembentuk hukum (legislator) dituntut mampu menyaring dan merumuskan perkembangan nilai dalam masyarakat tersebut, karena pada dasarnya hukum lahir dari nilai yang ada di masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan karakter ini kemudian menjadi corak yang menunjukkan identitas bahwa suatu masyarakat memiliki nilai

eksistensi. Jika hukum berwatak mengakomodir nilai yang berkembang di masyarakat, apakah semua nilai termasuk nilai kekhasan masyarakat tersebut perlu secara keseluruhan dituangkan dalam bentuk pranata hukum (tertulis)? Atau, dengan penalaran lain, apakah nilai yang ada dalam masyarakat namun tidak tertuang pada aturan hukum (tertulis) tidak merupakan nilai yang dianggap ada?

Judul pada tulisan ini sebenarnya lebih dilatarbelakangi pada daya nalar spekulatif menyikapi disahkannya RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) oleh Baleg DPR pada 13 September 2018 lalu sebagai RUU inisiatif DPR. Sebagaimana diketahui, semula nama yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional Lima Tahunan 2014-2019 tertera Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagai usulan DPR. Kemudian pada perkembangan berikutnya muncul nama RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diusung oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diakomodir dalam Rapat Paripurna pada tanggal 11 Januari 2017 dengan menetapkan 50 RUU Prolegnas 2017, termasuk di dalamya RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) yang resmi sebagai usulan DPR.

Menyadur apa yang disampaikan oleh Cucun A. Syamsu Rijal (Sekretaris F-PKB DPR) pada pemberitaan Republika.co.id, bahwa RUU LPKP secara umum dibuat dalam rangka memberikan pengakuan dari negara kepada lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), yang mengatakan bahwa hal terpenting dari RUU LPKP adalah pengakuan negara pada Pesantren (disampaikan dalam Rapat

Koordinasi Lembaga Pendidikan Keagamaan/LINK). Maka, perbincangan dari sudut pandang nilai ke-pesantrenan menjadi hal penting untuk dikemukakan.

Pertanyaan mendasarnya, apakah selama ini Pesantren tidak diakui oleh negara? Lebih umum lagi, apakah hukum tidak meng-cover nilai ke-pesantrenan yang selama ini tumbuh dan berkembang di Indonesia? Menjawab pertanyaan itu, tentu para pembentuk hukum yang lebih memiliki kompetensi.

Ada tulisan menarik yang dibuat oleh Umi Zahrok (Tim Pokja RUU LPKP Badan Keahlian DPR) berjudul Politik Legislasi Pengaturan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Penulis merekomendasikan untuk membaca tulisan tersebut guna membuka cakrawala berpikir tentang RUU LPKP.

Diskursus dalam tulisan ini mencoba menguraikan beberapa permasalahan berkaitan dengan wacana pengesahan RUU LPKP menjadi UU. Memang, dari sudut pandang kewenangan, pembentuk hukum memiliki otoritas dalam menentukan materi muatan apa yang akan dituangkan dalam suatu UU. Oleh karenanya, pembentuk hukum juga dituntut mampu menjabarkan 'kebutuhan hukum' yang perlu diakmodir dengan munculnya suatu produk hukum.

Di sisi lain, pembentuk hukum juga wajib tunduk pada teknik perumusan norma pada suatu aturan hukum tertentu. Hal ini penting agar tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari yang cenderung menghambat aplikasi aturan dalam tataran praktis.

Pesantren: Antara Eksistensi dan Rekognisi

Catatan sejarah yang menjadi fakta penting adalah keberadaan Pesantren telah lama ada sebelum Republik ini lahir. Bahkan Pesantren dianggap sebagai produk budaya asli *(indigenous culture)* bangsa Indonesia yang muncul bersamaan dengan proses Islamisasi di Nusantara pada sekitar abad ke-13 M. Penyelenggaraan Pesantren bermula dari tempat-tempat pengajian *("nggon ngaji")* yang mengajarkan dasar-dasar ilmu keislaman, seperti akidah/tauhid *(Islamic theology)*, fiqh, akhlak, al-Qur'an, hadits, dan nahwu/sharf *(Arabic grammar)*.

Bentuk ini kemudian berkembang dengan mendirikan tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut *pesantrian* atau pesantren. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada saat itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pada saat itu pendidikan ini sangat bergengsi.[1]

Era perebutan kemerdekaan, pesantren semakin menunjukkan perannya sebagai garda terdepan menumpas penjajahan di Indonesia. Hingga saat ini pun, lembaga pendidikan pesantren tetap eksis dalam menumpas 'penajajahan moral' bangsa Indonesia. Karakternya yang khas, multikultural dan menyesuaikan dengan peradaban menjadi salah satu ciri model pendidikan pesantren. Maka tidak salah jika hingga saat ini pun model pendidikan pesantren tetap diterima di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

---

[1] H.M. Suparta, Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1, Juni 2014, hal. 174.

Senada dengan hal tersebut, menurut Azyumardi Azra bahwa pesantren merupakan pendidikan agama Islam tradisional di dunia yang mampu bertahan hingga kini karena akomodatif dan bisa melakukan penyesuaian diri, berakulturasi dengan budaya setempat.[2]

Lebih lanjut ditambahkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang seperti yang dikenal dengan sebutan *pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah*. Pesantren, pondok sebutan untuk wilayah Jawa, surau untuk Sumatera Barat, dayah untuk wilayah Aceh. Pondok, pesantren, surau, dan dayah merupakan pendidikan Islam tradisional yang kurikulum pendidikannya diatur oleh pengasuh (*kyai*: Jawa), dan sekarang pendidikan Islam tradisional secara umum disebut dengan pesantren. Kalau madrasah bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia yang modern dan kurikulumnya diatur secara Nasional oleh Kementerian Agama. Pendidikan pesantren mempunyai tiga tradisi penting, yaitu tranmisi pengetahuan agama, menjaga tradisi Islam dan ketiga reproduksi ulama.[3]

Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa pesantren memegang peran sentral di bidang agama, budaya, ekonomi, sosial, bahkan dalam bidang politik. Pada bidang agama, pesantren tidak diragukan lagi kiprahnya. Pesantren juga konsisten menjaga "tradisi" turun-temurun yang khas dari bangsa Indonesia menunjukkan bahwa budaya pesantren sebagai cerminan budaya asli masyarakat Indonesia. Pun, di

---

[2]Ayumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mellinium III,* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 107-116.

[3] Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, *"Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society"*, Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity andIslamic Education Boston University, Cura (May, 6-7, 2005), hal. 1-4.

bidang sosial dan ekonomi, kemandirian pesantren memberikan teladan bagi masyarakat untuk berperilaku berdiri di atas kaki sendiri. Tidak bergantung pada siapa pun baik dari sisi pendanaan maupun sisi yang lain. Dari aspek politik, tidak jarang alumnus pesantren berkiprah di dunia politik. Tidak jarang pula para alumnus tersebut menduduki jabatan publik yang langsung bersinggungan dengan kebijakan implementatif di masyarakat.

Singkatnya, dari sisi eksistensi, Pesantren dengan corak multikultural mampu mempertahankan keberadaannya. Bahkan sampai kapan pun juga, dengan mempertahankan cita rasa perpaduan adat (budaya) dengan proses pendidikan keagamaan terbukti membawa pesantren diterima di tengah kehidupan masyarakat (Indonesia). Lebih jauh Paul C. Gorski, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural sebagai proses transformasi. Ada tiga bagian transformasi yang dilakukan, yaitu; transformasi terhadap diri pribadi *(the transformation of self)*, transformasi pendidikan di sekolah *(the transformation of school and schooling)*, dan transformasi sosial *(the transformation of society)*. Ketiga tujuan transformasi ini dimasukkan dalam rumusan kurikulum pendidikan dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap segala aspek pendidikan, seperti persiapan guru, materi pendidikan, kurikulum, ruang kelas, praktik konseling, dan *assessment*.[4] Apa yang dikatakan oleh Gorski itupun secara keseluruhan tercover dalam bingkai pesantren.

Bagaimana dengan (pengakuan) oleh negara? Apakah pesantren yang demikian besar kiprahnya pada generasi bangsa (masih) membutuhkan rekognisi dari negara? Tidakkah

---

[4] Paul C. Gorski, *Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations,* (New York: McGraw-Hill, 2005), hal. 12-15.

pesantren bagian yang tak terpisahkan dengan negara? Memang tidak dapat dipungkiri pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul sebagai reaksi atas besarnya (jasa) pesantren pada negara. Namun, di muka telah disinggung bahwa secara historis justru pesantrenlah yang ikut 'membidani' lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Terlebih, mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi salah satu elemen penting tujuan pendidikan pesantren termaktub pula sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia (Pembukaan UUD NRI 1945). Jadi, kalau berkaca pada landasan filosofis demikian, sebenarnya justru negara yang mendapatkan pengakuan dari pesantren. Sekarang tinggal negara, bagaimana akan bertindak terhadap pihak yang berjasa padanya. Menyingkirkan, mendiskreditkan atau memberikan penghargaan?

Telaah lain dari aspek nilai kepesantrenan, hampir dapat dipastikan para pengajar (sebutan penulis) di pesantren, tidak ada satu pun yang berharap imbal balik atas tindakan yang dilakukan pada santrinya. Semata-mata hanya menjalankan perintah agama, mentransformasi keilmuan agama dan mencerdaskan kehidupan bangsanya sebagai bagian *hubbul wathon*. Maka jika berbondong-bondong muncul serangkaian pendapat bahwa kelahiran RUU LPKP dalam rangka melegitimasi rekognisi negara pada pesantren, hemat penulis perlu dilakukan kajian mengenai standar nilai di pesantren. Ataukah justru memang nilai-nilai kepesantrenan sudah berubah? Sejak kecil hingga saat ini penulis hidup di tengah iklim pesantren. Sampai saat ini pula, nilai itu tetap dan tidak berubah.

Berdasarkan penelitian Marzuki, dkk., dalam temuannya menjelaskan bahwa pesantren mampu mewujudkan pendidikan

Islam multikultural. Kalangan pesantren bisa mengintegrasikan antara tradisi lama dan tradisi baru. Landasan yang dipakai itu inklusif, terbuka, dan mampu mengambil hal-hal baru untuk menerima perkembangan yang baru untuk kebaikan, sehingga pesantren bisa mengikuti arus modernitas, ataupun globalisasi, baik dalam hal pemikiran Islam, praktik pendidikan dan interaksi antar golongan. Pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh lokal maupun nasional yang pemikirannya inklusif dan moderat. Islam yang dibawa dan dikembangkan adalah Islam yang ramah, moderat, toleran dan sarat dengan nilai-nilai multikultural.[5]

Kemudian Badrus Sholeh melihat pesantren mampu menyatu antara kajian Islam Timur Tengah bersama dengan tradisi lokal dan masyarakat. Penyatuan tradisi ini membuat karakteristik Islam Indonesia berbeda dengan Islam Timur Tengah ataupun yang lainnya. Pesantren mempunyai peran strategis lain selain berperan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan Badrus Sholeh ini untuk mengetahui peran pesantren secara dekat dalam hal peran pesantren sebagai titik temu sebuah perdamaian konflik social dan akulturasi dengan kearifan lokal.[6]

Prinsipnya, pembicaraan pada tataran nilai baik dari segi budaya maupun peradaban pesantren sungguh kompleks dan tidak ada habisnya. Bahkan penulis dapat katakan, pesantren merupakan cerminan mewakili nilai yang berkembang di

---

[5] Marzuki, Muhammada Murdiono, Miftahuddin, *Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf*, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010, UNY (2010), hal. 327-347.

masyarakat, sebab hakikatnya pesantren pun ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Mengidentifikasi pesantren dengan mengintegrasikan pada elemen peraturan perundang-undangan sebenarnya menyempitkan cakupan yang "diemban" oleh pesantren. Namun juga tidak dapat disalahkan, jika langkah-langkah akomodatif pesantren pada sistem hukum nasional dianggap sebagai upaya menjamin kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Meskipun kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum masih menjadi dua kutub yang berlainan (antinomi).

Dalam konteks sistem hukum nasional, memayungi tindakan publik dengan produk hukum hampir dapat dipastikan menjadi keharusan. Apalagi pada hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Ini pun, penulis cermati juga menjadi bagian yang melatarbelakangi lahirnya RUU LPKP. Penulis memang tidak menyinggung secara konseptual substansi RUU LPKP mengingat terdapat beberapa versi (karena memang masih dalam taraf pembahasan). Sedapat yang penulis ketahui, salah satu hal yang didengungkan pada RUU LPKP adalah adanya alokasi anggaran sebanyak 10% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan. Memang, dalam hal anggaran perlu adanya kejelasan payung hukum.

Secara teoretis, pengakuan dapat berbentuk *de facto* maupun *de jure*. Terminologi pesantren, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah disebut-sebut. Khususnya pada bagian

---

[6] Badrus Sholeh, "'Pesantren, Peace Building And Empowerment': A Study Of Community Based Peace Building Initiative," Al-Jami'ah, Vol. 43, No. 2, (2005/1426 H), hal. 327-247.

pendidikan keagamaan. Menurut penulis, penyebutan frasa pesantren pada UU Sisdiknas juga merupakan pengakuan. Selain pengakuan-pengakuan oleh negara sebagaimana telah penulis uraikan di awal pembahasan sub ini.

Pasal 30 ayat (4) UU Sisdiknas menyatakan bahwa *Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.* Selanjutnya, dalam ayat (5) dinyatakan bahwa *Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.* Maka tidak salah, pada tahun 2007 terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas tersebut.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa sebenarnya, pesantren baik secara *de facto* maupun *de jure* telah mendapatkan tempat dan diakui keberadaannya oleh negara. Sebaliknya, jauh sebelum negara ini lahir, justru pesantren telah mengakui keberadaan negara Republik Indonesia. Singkatnya, pesantren-lah yang mengakui negara, bukan negara yang mengakui pesantren lebih dahulu.

RUU LPKP dalam Sisi Politik Hukum

Pembahasan mengenai politik hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tahapan-tahapannya yang meliputi formulasi, aplikasi dan eksekusi. Namun dalam konteks perbincangan mengenai RUU LPKP, tahapan yang relevan lebih condong diarahkan pada tahap formulasi. Tahap di mana aturan hukum tersebut hendak dibentuk untuk diterapkan.

Sebagaimana diketahui, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terikat dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara filosofis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Pedoman asas ini menjadi salah satu aspek penting dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam UU tersebut juga diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. RUU LPKP ke depan jika telah ditetapkan menjadi UU, secara hierarkis berada pada posisi setingkat di atas Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini perlu penulis sampaikan berkaitan dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas pada pembahasan di atas.

Frasa "diatur dengan Peraturan Pemerintah" sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas bisa bermakna kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan PP tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Secara faktual pun, PP Nomor 55 Tahun 2007 telah ada dan berlaku di Indonesia. PP ini sebagai tindak lanjut dari apa yang diperintahkan dalam UU Sisdiknas. Bagaimana dengan RUU LPKP? Dasar lahirnya penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas dimungkinkan pada beberapa kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2011.

RUU LPKP sebagai inisiatif DPR, dimungkinkan pula muncul karena adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 huruf h). Usulan DPR berkaitan dengan RUU LPKP ini pun sejalan dengan pengaturan Pasal 43 ayat (1)

UU Nomor 12 Tahun 2011. Menarik untuk dikaji lebih jauh adalah mengenai siapa yang memunculkan aturan tentang pendidikan keagamaan. Antara UU dan PP tentu memiliki perbedaan. UU secara teori ketatanegaraan merupakan produk legislatif (meskipun dalam praktik di Indonesia, terdapat ruang persetujuan dengan Presiden/eksekutif (Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011). Adapun PP murni produk eksekutif (Pasal 54 UU Nomor 12 Tahun 2011).

Upaya pembentukan UU LPKP menurut penulis juga bermakna peningkatan legitimasi hukum dari yang semula diatur dengan PP menjadi UU. Maka, jika UU LPKP telah sah dan berlaku di Indonesia, perlu dilakukan harmonisasi aturan hukum demi menjalankan tertib hukum dalam bingkai sistem hukum nasional. Pasalnya, secara substantif, RUU LPKP merupakan bentuk khusus *(specialis)* dari UU Sisdiknas. Sedangkan UU Sisdiknas berkaitan dengan pendidikan keagamaan memerintahkan untuk mengaturnya dengan PP (Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas).

Sejauh ini, sepanjang berkaitan dengan pedoman anggaran untuk pendidikan keagamaan, penulis sependapat agar menjadi materi muatan dalam UU LPKP mendatang. Ini pun dalam rangka menghindari tafsir berbeda perihal agama dalam iklim otonomi daerah berkaitan dengan alokasi anggaran. Namun hal-hal lain termasuk teknik definitif, limitasi pembentukan pesantren dan kualifikasi pesantren perlu dikaji lebih jauh agar tidak terjadi blunder dan terkesan intervensi negara pada entitas pendidikan agama (pesantren dengan segala corak khasnya).

Demikian halnya berkaitan dengan alokasi anggaran. Penulis berkeyakinan tidak sedikit para pemangku pesantren

yang tidak berkenan mendapatkan bantuan. Mereka lebih 'nyaman' dengan hidup di tengah kemandirian. Termasuk kemandirian ekonomi. Bahkan ada yang frontal mengatakan 'haram' mendapatkan bantuan. Memang inilah salah satu corak kehidupan pesantren. Namun segala kemungkinan tetap ada. Aspek negatifnya, ada pula yang 'memanfaatkan' kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan menjelma menjadi pesantren hanya berlandaskan legitimasi secara hukum. Pesantren Yuridis? Mungkin itu salah satu tafsir maknanya. Namun tetap ada pula tafsir yang berbeda dan tentunya tidak dalam tulisan ini penulis sampaikan.

Teringat era KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau enggan memasukkan pesantren dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Apa maksudnya? Sejauh yang penulis amati dari satu sisi, memang tidak mudah mengkonkritkan pesantren dengan segala pirantinya ke dalam bentuk hukum. Misalnya, menerjemahkan makna Kyai. Satu kata ini banyak sekali perbedaan tafsirnya. Belum lagi makna-makna yang lain.

Penulis sempat berdiskusi dengan Prof. Dr. KH. KPP. Noer Nasroh Hadiningrat perihal RUU LPKP. Sedikit yang penulis sampaikan, beliau berharap UU LPKP tidak menjadi 'wahana' merendahkan harkat dan martabat Kyai. Dalam dunia pesantren, penghormatan kepada kyai tidak ubahnya sebagai penghormatan *warotsatul anbiya'*. Kyai murni gelar dari masyarakat. Sedangkan masyarakat secara alamiah memanggil dengan sebutan Kyai adalah takdir dari Allah. Allah telah mendudukkannya pada porsi itu.

Penulis pun berharap, wacana UU LPKP tidak sebatas komoditas politik (dalam arti politik kekuasaan). Terlalu sering pesantren terombang-ambing dalam dunia politik, meskipun

tidak dilarang. Tidak jarang pula hanya karena perbedaan pandangan politik justru menjauhkan silaturrahmi antar pesantren.

Penutup

Tulisan ini adalah refleksi, khususnya bagi penulis sendiri sebagai insan yang berkecimpung di dunia hukum, juga dunia pesantren. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu disampaikan. Kiranya, pada forum yang lain dapat pula dikemukakan. Tentu dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan, sehingga penerimaan terhadap masukan dari para pembaca atas tulisan ini sangat penulis harapkan.

Bacaan

Ayumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mellinium III,* (Jakarta: Kencana, 2012)

Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, *"Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society"*, Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University, Cura (May, 6-7, 2005)

Paul C. Gorski, *Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations,* (New York: Mc Graw-Hill, 2005)

Marzuki, Muhammada Murdiono, Miftahuddin, *Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf*, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010. UNY (2010)

Badrus Sholeh, "'Pesantren, Peace Building And Empowerment': A Study Of Community Based Peace

Building Initiative," Al-Jami'ah, Vol. 43, No. 2, (2005/1426 H)

H.M. Suparta, Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1, Juni 2014

Bagian 2

ISNU UNTUK INDONESIA YANG AMAN DAN SEJAHTERA

Oleh:
Edi Eka Setiawan, S. Hum.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama
Siap Berbakti dan Beraksi
Untuk Idonesia yang aman dan sejahtera
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama
Para Cendikia Bergerak
Kami Merindukan Islam Indonesia yang ramah bersahaja

Kalau tidak salah ingat, saya pertama kali mendengarkan Mars ISNU pada tahun 2013 silam, ketika masih aktif di Museum NU Surabaya. Waktu itu ada pertemuan ISNU di Aula lantai 3 Museum yang dihadiri ketua ISNU Jawa Timur, H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. Ada yang menarik dari Mars ISNU, yakni dua bait yang saya tulis diatas yang berisikan cita-cita yang besar, meski waktu itu ISNU baru saja lahir.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat ISNU merupakan langkah progresif dari kalangan intelektual NU, meski lahirnya secara resmi sangat telat. Tahun ini usia ISNU baru menginjak 7 tahun. Usia yang cukup muda dibandingkan dengan Banom (Badan Otonom) NU lainnya.

ISNU berhasil dibentuk dan dilembagakan pada tahun 2012 berdasarkan salah satu hasil dari Muktamar NU ke-32 di Makassar yang berlangsung pada 22-28 Maret 2010.

Peranan para Intelektual dan cendekiawan NU sejak dari dulu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan NU. Sebab karakteristik utama dari NU adalah tradisi intelektual yang moderat, apresiatif terhadap khazanah pemikiran masa lalu (*Legacy of the past)* maupun budaya lokal, dan kemampuannya menyerap tradisi pemikiran baru yang datang dari manapun melintas batas Negara, agama dan ember .[7] Sehingga menjadikan NU sebagai salah satu organisasi terbesar di negara ini.

Dilihat dari sejarahnyapun, NU tak bisa dipisahkan dari pemikiran intelektual yang moderat. NU yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Kampong Kertopaten Surabaya berawal dari kegelisahan para Ulama terhadap kebijakan Raja Abdul Aziz Ibnu Saud (penguasa Hijaz, Saudi Arabia) yang akan mengusur makam Nabi Muhammad SAW. Terbentuklah Komite Hijaz untuk berangkat ke Arab dengan tujuan mencegah kebijakan raja Arab yang berfaham Wahabi tersebut. KH. Wahab Hasbullah bersama Syekh Gonaim Al-Misyri (Mesir) berangkat sebagai delegasi dari Umat Islam Indonesia untuk menggagalkan misi raja Arab demi keberlangsungan keberagamaan umat Islam di seluruh Dunia.

Seiring perkembangan waktu, intelektual NU yang notabennya sudah berumur *sepuh* mulai digeser dengan munculnya intelektual-intelektual muda yang lebih gesit dan

---

[7] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul masail 1926-1999,* (LKiS: Yogyakarta) 2004.

progresif sehinga bias mengakomodir kepentingan umat dan pemerintah pada tahun 80-an.

Pemikiran moderat yang ditunjukkan oleh para Intelektual NU merupakan sebuah landasan kokoh untuk membangun bangsa Indonesia. NU selalu menempuh jalur tengah dalam segala ember yang ada di Indonesia. Mencoba ember pandangan yang luas bukan pemikiran yang sempit. Sehingga antara Agama dan Negara sebagai dua entitas yang berbeda bisa menepatkan posisi masing-masing yang saling membutuhkan.

Kita sangat beruntung sekali terlahir di Indonesia, menjadi warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga dengan kehadiran organisasi keislaman yang sangat moderat. Sehingga perbedaan Ras, Suku dan agama tidak menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa. Meski hari ini, Indonesia sedang sakit demam. Agama dijual demi kepentingan politik, ayat-ayat suci diobral demi mendapat dukungan, Tuhan dibawa-bawa demi kekuasaan, mengkafirkan sesama agar dianggap paling Islam dan lain sebagainya.

Memang akhir-akhir ini siklus keberagamaan di negeri ini memang tidak sehat. Tapi, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita masih beruntung ada NU dengan Uama dan paa inteletktual yang terus meredam gejolak radikalisme atas nama agama. Meski setiap hari hujatan dan fitnah tak henti-hentinya menerpa mereka. Itu pulalah tugas kita sebagai generasi muda dan para inteletual, sarjana dan para ilmuwa NU untuk ikut menebar kedamaian di rumah kita. Selain juga masalah kesejahteraan umat.

Meski ISNU bisa dikatakan baru, tetapi perlu diketahui bahwa tradisi intelektual para sarjana, ilmuwan, cendekiawan NU sudah ada dari dulu. ISNU hadir sebagai Warna baru, sehingga dapat memberikan sebuah pencerahan dan motor penggerak kesejahteraan umat.

Sehingga apa yang dicita-citakan ISNU yang tercantum dalam Mars ISNU bisa menjadi sebuah kenyataan. Sebab bagi saya, lirik yang terbentuk merupakan sebuah pegangan dalam bertindak. Mars ISNU bisa menjadi rujukan utama yang bisa dikembangkan melalui pemikiran kebangsaan dan program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat NU dan Indonesia umumnya bisa mencapai kesejahteraan.

Selain itu, ISNU sebagai wadah para sarjana, intelektual dan ilmuwan harus bisa menjembatani antara rakyat dengan pemerintah, harus benar-benar mengedepankan kepentingan umat. Dengan kualitas yang dimiliki para jajaran ISNU baik Pusat, Wilayah ataupun daerah dengan cita-cita "Siap berbakti dan Beraksi, Untuk Indonesia yang aman dan sejahtera", akan bisa menjadi garda terdepan untuk membela rakyat, bukan demi uang atau proyek yang menggiurkan lalu melenceng dari cita-cita luhurnya.

Satu lagi, seperti yang di sampaikan Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM. di halaman beranda website ISNU Jawa Timur, bahwa agar ISNU dapat dikatakan sebagai organisasi para sarjana yang sungguh-sungguh, maka cirri anggota ISNU adalah menulis, meneliti dan menguatkan bidang Literasi di bidang yang ia geluti. Maka yang dikatakan ISNU ya literasi itu sendiri.

Bagian 3

NU SIAPKAN KARPET MERAH UNTUK GENERASI MILENIAL

Oleh:

Wawan Purwadi, S.Pd.I.

NU (*Nahdlatul Ulama'*) adalah organisasi garda depan yang selalu mambela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masifnya gerakan Islam ekstrimis membuat NU mempunyai tugas berat untuk mangamankan negara secara internal dan eksternal. Pengamanan internal adalah langkah NU untuk membentengi warga *nahdliyin*. Bahwa Nahdlatul Ulama' merupakan pengamal *Ahlussunnah Wal Jamah* yang diilhami oleh Islam *rahmatan lil a'alamin (*bahwa Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam). Aswaja merupakan manifestasi Islam yang memegang teguh nilai-nilai agama Islam yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengamanan ekternal adalah bagaimana NU siap siaga untuk selalu melihat situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada industri 4.0 ini juga. Di mana masyarakat lebih cepat menerima informasi apapun melalui media elektronik (Ebook. Nugraha, *Transformasi Sitem Revolusi Industri* 4.0 30 September 2018). Karena perkembangan

wacana yang menghancurkan aqidah atau ke-Islaman masyarakat Indonesia begitu cepat. Diakui atau tidak dengan adanya internet pula masyarakat kita mulai bergeser untuk mempelajari berbagai hal. Termasuk agama, masyarakat sekarang seolah-olah tidak memerlukan Kyai atau orang yang memang benar-benar paham soal agama. Dan yang paling berbahaya adalah mempelajari agama melalui *youtube,* kemudian ditelan mentah-mentah tanpa ditelaah.

Industri 4.0 Menururt Scwab, memiliki 4 dampak yang cukup besar terhadap manusia didunia yaiu; *Argumentasi*; Kecepatan, keluasan dan kedalaman, dampak sistemik (terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. *Dampak sistemik*; Ketimpangan sebagai tentangan terbesar. *Megatrend*; fisik (kendaraan tanpa pengemudi, mesin cetak 3D, advanced robotics, dan material baru), digital, biologis. *Tipping point*; dari industri 4.0 diperkirakan terjadi pada tahun 2025.

Terus apa hubungannya antara NU dan generasi milenial? Menurut hemat saya ini adalah hal yang perlu ditangkap lebih awal untuk NU dalam mempersiapkan generasi emasnya menangkap datangnya industri 4.0. Karena merekalah yang akan memegang tongkat estafet perjuagan para sesepuh untuk memperjuangan kekuatan NKRI dari zaman yang semakin modern pada era serba cepat.

Disadari atau tidak pada era melenial ini tantangan manusia semakin besar. Memang Islam tidak akan berubah dan tidak ke mana-mana. Tapi, manusialah yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika manusia tidak siap untuk menerima perubahan tentu akan tergilas oleh perubahan tersebut.

Tugas NU dan Para Sesepuh

Setiap masa mempunyai sejarah yang berbeda. Seperti halnya NU (*Nahdlatul Ulama'*) pada era Mbah Kyai Hasyim Asy'ari tokoh pendiri NU dan abad 21 ini tentu sangat berbeda. Tantangan zaman semakin kompleks, integritasnya sebagai organisasi Islam dituntut untuk selalu bertahan dalam segala medan, "*Al-Muhafaddhotu 'Ala Qodimis Sholih Wal Akhdzu Bil Jadidil Ashlah*", (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Nilai dalil yang harus kita tangkap bersama pada konteks hari ini adalah bahwasanya NU organisasi yang dinamis dalam era apapun. Tugas NU adalah menyiapkan kaum muda untuk sigap dalam mengemban nilai perjuangan organisasi. Dengan garis *backup* para sesepuh atau Kyai. Kenapa demikian, karena pada hari ini dalil slogan NU telah dijadikan alat serang melemahkan eksistensi NU. Bukan tidak mungkin jika kekuatan lawan tidak disadari maka akan menjadi serangan yang mampu membuat NU *kuwalahan*. Karena pada hari ini oknum kader NU juga ada yang terseret dalam tipu daya Islam ekstrimis. Dengan dogma yang terlanjur menancap diotak menjadikan mereka total untuk menjadi bagian kader bai'at Islam ektrimis. Yang salah mengambil jalur jihad.

Maraknya gerakan ekstrimis memberikan pandangan warga Islam menjadi berbeda dan selalu terjadi perdebatan. Bagaimana tidak, mereka saling mempertahankan eksistensi kelompok masing-masing. Merasa paling benar, merasa paling Islam dan mereka menganggap selain orang Islam tidak pantas hidup di Indonesia. Sehingga gerakan untuk melemahkan Indonesia semakin massif.

Hari ini umat muslim dibuat bingung untuk memilih tokoh yang menjadi panutan. Karena tokoh yang mereka kagumi juga menjadi bagian konflik. Semua orang menyadari bahwa agama adalah jalan perdamaian, dari agama ini kita berpikir bahwa agama berjuang untuk kebenaran. Namun agama pada hari ini dibuat untuk mengejar kemenangan kelompok. Dan parahnya agama hari ini dijadikan kendaraan politik, mereka menganggap jalan yang diambil adalah *jihad fisabilillah*.

Belajar dari kejadian itu. NU harus mempunyai kader yang mempunyai kaki kokoh untuk berdiri tegak melakukan tugas mengamankan masa depan agama dan negara. Saya juga meyakini bahwa kader NU yang pada hari ini masuk dalam pemerintahan adalah kader terbaik NU. Mau tidak mau, untuk mengamankan negara harus ikut masuk dalam politik. Namun yang tidak kalah pentig adalah restu para sesepuh untuk memberikan keleluasaan bergerak sesuai atmosfir yang berkembang. Sehingga gerakan yang dilakukan sesuai dengan haluan.

Siapkan Karpet Merah Untuk Kader Muda NU

Demi masa depan agama dan negara. NU harus menyiapkan santri atau kader mudanya untuk mampu bertarung dalam segala medan. Saya yakin bahwa tanpa harus diyakinkan NU sudah bersiap. Tapi, bagaimana dengan melihat kondisi hari ini. NU harus lebih rela untuk merestui kader muda terbaik dalam menjalankan tugas mulia menjadi bagian benteng pertahanan negara. pandangan saya NU menyiapkan karpet merah adalah bagaimana keberadaan seluruh kader harus dideteksi peran dan keberadaanya didalam lingkungan masyarakat. Bahkan yang jadi politisi sekalipun harus selalu

menjadi mata rantai penghubung antara kepentingan agama dan negara.

Menurut John L. Posito dalam bukunya, *Masa Depan Islam Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat,* Cetakan I, 2010. Sebenarnya di bumi timur tengah sendiri juga masih banyak dicederai konflik politik etnis, suku golongan, mazhab dan kepentingan. Umat Islam di Timur Tengah masih terjebak dalam kubangan feodalisme dan fanatisme madzab yang terkurung dalam jubah politik sektarian. Islam juga terus dibajak untuk kepentingan sesaat, masa konflik lintas peradaban sewaktu-waktu bisa terjadi lebih dahsyat lagi. Pandangan Posito ini tentu bukan hanya sebuah pandangan kosong saja. Tapi, ini adalah realita yang harus diterima oleh masyarakat dunia.

Khususnya pada masyarakat Islam di Indonesia juga harus lebih sigap untuk melihat situasi ini. Sadar akan hal yang terjadi. Bahwa, gerakan adu domba ini juga mencoba untuk dilakukan di negara Indonesia. Wacana ini harus menjadi konsumsi bersama untuk membuka ruang dialektika penyadaran kepada masyarakat luas. Jika ini hanya dianggap menjadi hal yang biasa. Maka yang terjadi akan menjadi bom bastis, sewaktu-waktu meledak dan meluluh lantakan semuanya.

Menurut saya untuk mengantisipasi hal ini semua harus dikomunikasikan dengan baik. Baik dari pihak pemerintah, tokoh politik, ilmuan, tokoh pendidikan dan tidak kalah penting adalah para sesepuh agama. Karena mereka adalah kunci dari pada perdamaian yang akan selalu terjaga dalam bingkai ideologi Pancasila.

Membangun Kesadaran Politik Untuk Kaum Muda

Masalah politik selalu melingkupi kehidupan manusia. Artinya, manusia dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dari politik, atau *zoon politicon* dalam term Aristoteles. Generasi muda adalah pondasi demokrasi republik ini. Maka penting kiranya untuk pemuda tidak acuh terhadap perpolitikan. Tidak sekadar menjadi gerombolan penggembira. Namun, seharusnya menjadi entitas penting guna menjaga kewarasan dalam politik. Sadar berpolitik tidak harus caleg atau jadi tim sukses. Tetapi, lebih kepada menjadi motor perubahan, tentu dengan gagasan serta tindakan yang lebih mencerminkan generasi melek politik. Seperti memiliki keberanian untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai kepentingan masayarakat luas, melakukan upaya penyadaran berkarya, tentu dengan tujuan mengembalikan marwah politik yang bernapaskan kebangsaan.

Jikalau generasi muda sadar politik pasti akan lebih membuka diri bagaimana menyikapi keruwetan politik yang terjadi pada hari ini. Tidak kemudian *nyiyir* tidak jelas dikolom-kolom media. Sehingga yang terjadi malah berurusan dengan hukum. Kita amini bersama bahwa sadar politik akan menjadikan generasi muda lebih dewasa dalam bersikap. Karena dengan kesadaran politik akan mengembalikan nilai sila pancasila yang kedua, "kemanusiaan yang beradab". Oleh sebab itu, dengan membangun kesadaran politik akan menjadikan generasi muda lebih humanis dan menjadikan generasi politik yang lebih bermoral. Saya sendiri meyakini bahwa kesadaran yang terbentuk akan mewarisi pemimpin masa depan yang lebih mengedepankan rasionalitas dari pada egosentris.

Merumuskan Gerakan NU (*Nahdlatul Ulama'*) Diera Melenial

Bumi akan terus berputar, hari silih berganti, generasi penerus siap mananti. Ini adalah sebuah bayangan bahwa NU harus bergegas untuk merumuskan gerakan dalam menyambut setiap peradaban yang baru. Pada hari ini disebut era melenial (Gen Y) paling tua berumur 36 atau 27 tahun, sementara yang paling muda 23 tahun. Mereka tentu saja masuk kategori umur produktif. Di mana generasi emas yang terlahir di tahun 1983-2000an. Karena generasi NU harus menjadi pemersatu bagi keberagaman umat dan penebar kasih sayang. Untuk mebangun peradapan itu, NU dengan lembaga pesantren harus memberikan sebuah gambaran besar bahwa gerakan perubahan diera digital yang sangat cepat. Dengan melihat kondisi ini, NU harus menyusun beberapa strategi dalam mempersiapkan generasi yang sadar betul terhadap setiap perubahan zaman;

a) NU harus memberikan edukasi literasi digital. Dengan demikian akan membangun kekritisan generasi NU dalam menganalisa informasi apapun yang dibaca. Sehingga santri didikan yang dibentuk mampu bertarung disegala medan pertarungan. Karena pada era ditigal berbagai bentuk literasi untuk menyerang eksistensi NU selalu diluncurkan.

b) NU harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melek terhadap Informasi Teknologi (IT).

c) Warga NU harus aktif mengakses media sosial. Tujuannya adalah untuk menangkal berbagai isu yang selalu berkembang di media sosial (Medsos).

d) Semua lapisan masyarakat, tokoh agama, guru dan khususnya kader NU harus terlibat aktif dalam menangkal berita hoaks.

e) Kader NU harus sering menulis hal-hal positif tentang lingkungan sekitar, jangan diam dan sibuk pada urusan hal-hal buruk. Yang hanya memperkeruh suasana lingkungan sekitar. Karena jika hal itu terjadi maka akan dimanfaatkan oleh oknum yang menginginkan warga *nahdliyin* terpecah belah. Sehingga ketahanan negara akan terancam.

f) Warga NU harus dibentuk untuk mampu meningkatkan level penilaian dalam kemodernan zaman sebagai upaya memerangi informasi yang keliru.

g) NU harus selalu mempertahanakan tali persaudaraan antar agama. Karena NU adalah organisasi yang selelu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari langkah-langkah yang saya paparkan di atas mari kita terapkan bersama-sama untuk membatasi medsos penyebar hoaks. Sehingga batas kewarasan kita terukur. Jangan sampai kita menjadi bagian orang tidak waras. Sehingga kewarasan warga *nahdliyin* secara umum juga selalu terkontol dalam koridor *Ahlussunnah Wal Jama'ah.*

Bacaan

Abdalla, Abshar, Muhammad, Goenawan, Susetyo, Benny, Baqir, Haedar dan Bisri, Mustofa. *Islam Liberal & Fundmental: Sebuah Pertarungan Wacana.* Yogyakarta: Elsaq Press. Cetakan VI. Juni 2007.

Aizid, Rizem. *Menguak Kontroversi-Kontroversi Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Saufa. Cetakan I. Maret 2014.

Baso, Ahmad. *Pesantren Studis 4a Buku IV: Khittah Republik Kaum Santri dan Masa Depan Ilmu Politik Nusantara, Juz Pertama: Akar Historis dan Fondasi Normatif Imu Politik-Kenegaran Pesantren, Jaringan dan Pergerakannya Se-Nusantara Abad 17 dan 18*, Jakarta: Pustaka Afid, 2013.

Bisri, Mustofa. *Agama Anugrah, Agama Manusia, Rembang*: Mata Air. Cetakan I, Agustus 2013.

Ghofir, Jamal. *Piagam Madinah Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: Aura Pustaka. 2012.

Ghofir, Jamal. *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah Pendiri dan Penggerak NU*. Yogyakarta: Aura Pustaka Cetakan I. April 2012.

Hamid, M. *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa. Cetakan I. 2012.

Hasan, Noorhadi. *Islam Politik Di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: SUKA Press Cetakan I. Januari 2012.

Esposito, John L. *Masa Depan Islam Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*. Bandung: MIZAN. Cetakan I 2010.

Khoiriyah. *Islam & Logika Modern Mengupas Pemahaman Pembaharuan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cetakan II. 2012.

Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,* Bandung: Mizan. Cetakan I, April 2008.

Nurdin, Amin dan Abbas, Fauzi. *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: AMZA. Cetakan I Februari 2012.

Wahid, Abdurrahman. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS. Cetakan II. Januari 2010.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: DEMOCRACY Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Zubaedi, *Islam & Benturan Perdaban*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, Cetakan II, 2012.

Weber, Max, *Sosiologi Islam*, Diterjemah, Halim, Abdillah, Yogyakarta; IRCiSoD, Cetakan I, 2012.

Bagian 4

NU STRUKTURAL DAN KULTURAL

Oleh:

Muhammad Rouf, M.Pd.I.

Struktural dan kultural, dua istilah inilah yang belakangan ini marak di kalangan NU (Nahdlatul Ulama). Marak karena keduanya sengaja dibenturkan dan diperlawankan. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah *jam'iyyah* atau organisasi tentunya memiliki basis ideologi dan basis gerakan. Tak dapat disangkal, *jam'iyyah* NU ini berdiri dengan tujuan mengorganisir jama'ah yang memiliki distingsi tersendiri, yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai kalangan penganut dan pelaku "Islam Tradisional" di mana sangat jauh sebelumnya sudah mengakar dan dilestarikan di kalangan muslim ini, terutama oleh kaum pesantren. Adanya *jam'iyyah* ini mempermudah konsolidasi dan koordinasi di kalangan pesantren, dimana bermula pada perlawanan para kyai terhadap pemberlakuan mono *Madzhab Wahhabi* di tanah Arab kala itu dalam bentuk pengiriman delegasi "Komite Hijaz". Kemudian setelahnya, NU menjadi basis perlawanan terhadap kaum kolonial Belanda maupun Jepang yang menduduki tanah air. Hasil yang fenomenal adalah rumusan "Resolusi Jihad NU" yang berhasil menggelorakan

semangat perlawanan para pejuang di Surabaya. Alhasil, dengan menjadi *jam'iyyah*, kaum tradisional ini dapat memberikan peran yang besar dan nyata, menciptakan transformasi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.

NU struktural, dimaknai sebagai orang-orang NU yang masuk dalam kepengursan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), baik di *syuriyah, tanfidziyah,* berbagai lembaga dan banom-banomnya, baik itu ditingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang hingga tingkat ranting. Keberadaan mereka memiliki posisi yang penting, karena dengan kinerja merekalah, NU sebagai *jam'iyyah* eksistensinya benar-benar ada dan apat dirasakan. Jika mereka yang masuk di jajaran sturktural ini tidak menunjukkan kiprah atau kinerja yang secara organisatoris terukur indikatornya, maka NU hanya kembali menjadi *jama'ah,* bukanlah *jam'iyyah.* Kinerja dan gerakan organisasi bukan semata hanya pelestarian kultur kegamaan yang telah menjadi ciri khas *jama'ah,* karena tanpa adanya sebuah organisasi, tradisi semacam tahlilan, manaqiban, maulidan, dziba'an, yasinan dan sebagainya ini sudah berjalan secara alamiah sebagai rutinitas budaya sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan NU sebagai *jam'iyyah* harus diwujudkan dalam gerakan nyata pemberdayaan warga NU di segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya. Kemandekan para pengurus NU di struktural inilah yang menjadikan adanya wacana tandingan "lebih baik NU Kultural saja, dari pada NU Stuktural". Apalagi jika sudah menyangkut politik praktis, warga NU hanya dijadikan alat sebagian elit politik negeri ini untuk mendulang suara, setelah itu warga NU ditinggal begitu saja tanpa diberdayakan.

Sedangkan, NU kultural adalah wacana yang menggelinding sebagai sebutan bagi orang-orang di kalangan

NU yang tidak masuk dalam stuktur kepengurusan NU, di segala tingkatannya. Atau dengan bahasa yang agak negatif, adalah mereka yang tidak kebagian jatah atau sengaja didiskreditkan untuk tidak masuk di jajaran struktural NU dengan segala latar belakang problematikanya. Dalam bentuk ekstrim, mereka melakukan penggembosan terhadap NU struktural. Apabila mereka adalah kader NU militan dengan basis ideologi dan skill organisasi yang mumpuni, maka tidak selayaknya untuk didiskreditkan, justru malah harus diberdayakan untuk umat. Kader NU muda yang telah berproses di ranting, anak cabang, cabang, komisariat perguruan tinggi dalam IPNU, IPPNU, PMII, KMNU, Fatayat, dan sebagainya haruslah diberikan akses yang seluas-luasnya untuk masuk pada jajaran strktural NU di atasnya, terutama mereka-mereka yang memiliki *ghirah* dan loyalitas organisasi yang tinggi. Tanggung jawab ini tentunya harus diamanahkan kepada pengurus NU, dalam memonitor kader-kader potensial yang akan meneruskan mereka dan tali estafet perjuangan NU. Bukan justru sebaliknya, karena berbagai kepentingan sempit jangka pendek kader-kader potensial semacam ini malah didiskreditkan, bahkan sengaja dimatikan jenjang karir kaderisasinya. Jika itu yang terjadi, maka istilah NU kultural akan mengemuka ke permukaan sebagai antitesa dari NU struktural. Bukanlah sebelumnya sudah muncul "NU garis lurus," yang cukup menghebohkan warga NU.

Lantas, bagaimana jalan tengah dalam menghadapi fenomena ini? di saat tantangan NU secara lokal dan global semakin kompleks?. Kiranya kita harus kembali kepada prinsip moderasi *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* NU, yaitu *tawassuth, tawazun, tasamuh,* dan *'adaalah. Pertama,* kader NU yang potensial dengan spesialisasi skill tertentu harus diberikan tempat untuk

berkiprah, sesuai dengan bakat, minat dan usianya. Monopoli sebagian kalangan tertentu di struktural NU dan pendiskreditan kader-kader NU yang potensial karena kepentingan-kepentingan sesaat tertentu, sudah saatnya dihentikan. Rekrutmen struktural NU harus berbasis pada latar belakang kaderisasi, bakat dan minat yang dimiliki. Tidak ada kepentingan yang patut dikedepankan di NU selain kepentingan *jama'ah, jam'iyyah*, masyarakat, bangsa dan negara. *Kedua,* dikotomi antara NU struktural dan kultural yang berkembang di masyarakat harus disudahi. Siapapun yang mendapat amanah untuk duduk di struktural organisasi haruslah bertanggung jawab menjalankan amanah dalam bentuk program kegiatan sesuai dengan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menjalankan roda kaderisasi NU dengan profesional. Begitu pula anggota NU yang tidak masuk dalam jajaran struktural tertentu, harus mendukung terhadap program apa saja yang dijalankan oleh NU, terlebih lagi untuk program level nasional PBNU yang harus *landing* sampai ke tingkat ranting. Semua kader NU harus meminimalisir friksi-friksi yang terjadi di tubuh NU sendiri dan bersinergi mengawal agenda-agenda dan gerakan NU di tengah-tengah masyarakat. Kemudian *ketiga,* mau tidak mau NU harus mendewasakan orientasi berpolitiknya, terutama bagi mereka yang terlibat dalam politik praktis. Tidak bisa dipungkiri, konflik yang menajam dan meruncing di kalangan kader NU dikarenakan kurangnya kedewasaan politik. Beda parpol, konflik internal parpol, menjadi rival dalam pilleg, pilpub, pilgub dan bahkan pilpres menjadi pemicu permusuhan di antara sesama kader. Khittah NU 1926, politik kebangsaan dan politik kemaslahatan adalah acuan penting yang harus digigit dengan gigi geraham, bagi kalangan NU yang terlibat dalam politik praktis. Bukan politik kepentingan perseorangan bahkan

kepentingan pemodal semata yang hanya menjadikan warga NU sebagai sapi perah, dan setelah itu selesai.

Wallahu A'lam.

Bagian 5

KAUM SARJANA HARUS SADAR AKAN BEBAN DOSANYA!

Oleh:

Hendra Try Ardianto, MA.

Saya akan memulai perbincangan kali ini dengan sebuah cerita. Pertengahan November 2018 lalu saya bertemu dengan mahasiswa asal Tuban. Ia kuliah di salah satu universitas di Jogja. Kami bertemu dalam acara Simposium Mahasiswa di sebuah hotel di Semarang. Kebetulan saya diundang menjadi pembicara dalam acara tersebut. Dari pertemuan itu, saya menangkap pesan positif sang mahasiswa: Dia peduli dengan perkembangan kabupatennya.

"Saya sudah berkumpul bersama teman-teman Tuban yang lain. Kita harus melakukan sesuatu untuk kabupaten tercinta. Saya dan teman-teman sedang menyusun beberapa program, salah satunya memaksimalkan potensi sumur tua. Rencananya, kalau rumusan kita selesai, kita akan audiensi

dengan jajaran pemerintah (Kabupaten Tuban)", tutur sang mahasiswa dengan optimis.

Saya lebih banyak mendengar dan mencermati, sesekali menimpali dengan pertanyaan. *Toh*, saya tak terlalu mengerti soal sumur tua. Tapi setelah saya ikuti pembicaraannya, saya melihat bahwa rencana mereka memiliki konsekuensi mengubah banyak sekali tatanan yang ada di masyarakat. Ketika saya konfirmasi, apakah sudah penelitian, dirinya menjawab belum. Dengan entengnya, sang mahasiswa menyebut penduduk di daerah yang dimaksud itu terbelakang. "Penduduk di sana membutuhkam banyak masukan dan inovasi agar bisa lebih maju", demikian yang disampaikan sang mahasiswa. Atas nama kemajuan, sang mahasiswa begitu gegabahnya ingin mengubah keadaan, begitu pikiran saya.

Situasi semacam itu tidak terjadi sekali saja, sudah beberapa kali saya rasakan saat bertemu dengan mahasiswa asal Tuban, baik di Jogja maupun Semarang. Ada kesan bahwa mahasiswa lebih terdidik, jadi lebih tahu persoalan yang dihadapi masyarakat (dibanding masyarakat itu sendiri). Saya juga menangkap kesan karena kuliah di universitas, mereka belajar metodologi sehingga merasa memiliki metode yang tepat untuk menyelesaikan peroalan. Pendapat kaum terdidik itu objektif, sedangkan masyarakat biasa itu penuh dengan kesalahan, adalah kesan yang terngiang di pikiran saya tentang para mahasiswa Tuban ini.

Pikiran di atas terus menggelayut dan meresahkan diri saya. Tiba-tiba, saya teringat catatan Snouck Hurgronje sebagaimana didokumentasikan oleh Harry J. Benda (1972). Dalam catatannya, Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa orang Belanda harus membantu orang Indonesia (Hindia

Belanda) yang terjebak dalam keterbelakangan. Belanda harus mengajarkan pengetahuan pada orang pribumi. Belanda harus mulai menjadikan pribumi rekan kerjanya. Dengan cara itu, maka kolonialisme "akan mengaburkan pembatas antara yang menguasai dan yang dikuasai."[8]

Perasaan superior sebagai orang terdidik, lagi-lagi perlu dirisaukan. Jika tak pernah dirisaukan, maka kita hanya akan menjadi penikmat "onani" pengetahuan yang terus menerus menggurui, tanpa mau mendengarkan. Itikad memperbaiki daerah asal adalah hal yang baik. Namun bukan berarti itu selalu tepat. Bagi saya yang belajar ilmu sosial, keengganan dan ketidakhati-hatian untuk memahami konteks sosial masyarakat akan menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Kehancuran kesejahteraan masyarakat, kadangkala bukan lahir dari masyarakat itu sendiri, tapi dari rekomendasi-rekomendasi kaum sarjananya.

Waduk Kedung Ombo adalah saksinya. Tahun 1985, tak kurang dari 5.286 keluarga yang tersebar di 37 desa harus digusur atas nama pembangunan dan kemajuan.[9] Mereka adalah kaum tani dan warga desa biasa. Dengan dalih pembangunan nasional, mereka dipaksa kehilangan tanah dan penghidupannya, bahkan persoalan ganti rugi ternyata belum selesai hingga sekarang. Siapa yang merekomendasikan bahwa waduk ini penting dan bermanfaat, tak lain adalah kaum cerdik pandai (sarjana) juga.

---

[8] H.J. Benda, *Continuity and Change in Southeast Asia, Collected Journal Articles of Harry J. Benda.* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972), hal. 89.

[9] Matanasi, P., Kejamnya Penggusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan. Retrieved January 17, 2019, from https://tirto.id/kejamnya-penggusuran-warga-kedung-ombo-dengan-dalih-pembangunan-cBfv

Sudah sejak lama, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa rekomendasi-rekomendasi kaum sarjana yang mengatasnamakan kebaikan, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan adalah jalan bagi negara dan korporasi jahat untuk menghancurkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Rekomendasi itu bisa lahir dalam skala yang kecil, berupa penggusuran dari kiri-kanan jalan, hingga skala besar berupa penggusuran ruang kehidupan dengan segala isinya: Alam dan manusianya sekaligus. Tak jarang semua itu dilakukan para sarjana atas nama "demi kebaikan" yang lebih besar.

Keangkuhan kaum sarjana, tak pernah luput dari keangkuhan sebagai manusia. Sebagaimana pendapat Ignas Kleden (1987): Manusia ternyata telah memperluas egosentrisme kesadarannya. Karena melihat dirinya sebagai sebab kebudayaan, dia secara tak sadar merasa dirinya juga sebagai sebab dari alam. Lingkungan kebudayaan memang diciptakan manusia tetapi lingkungan alam diciptakan Tuhan. Alam diciptakan dengan hukum-hukumnya sendiri yang kita kenal sebagai hukum alam. Tetapi hukum alam ini justru dijadikan alat di tangan manusia untuk menguasai alam. Hukum alam tidak dihormati tetapi hanya dimanipulasi. Keunggulan manusia harus dimenangkan dan alam harus dikalahkan demi kepentingan manusia.[10]

Hasrat untuk mengendalikan alam ini termanifestasi dalam semua metode teknikalisasi (rekayasa) alam. Justifikasi akademik bahwa teknikalisasi alam itu aman dan terkendali, memiliki konsekuensi bahwa segala jenis industri (pertambangan, pekerbunan, dll) dibolehkan. Kaum sarjana

---

10 I. Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 149.

inilah yang memberikan stampel objektif atas pengerukan-pengerukan alam selama ini.

Dari pengalaman riset saat di Kalimantan, saya menemukan kenyataan bahwa kebakaran hutan besar-besaran di sana, bukan sekadar karena praktik pembakaran masyarakat. Sejak nenek moyang masyarakat Kalimantan dahulu, sudah ada praktik membakar hutan, tapi mereka memiliki norma-norma spesifik agar praktik pembakaran tak menghancurkan alam dan manusia lainnya. Kondisi berubah, sejak ada ekpansi sawit besar-besaran di sana, izin-izin keluar dari Jakarta, rekomendasi diberikan oleh para sarjana, praktik pembakaran dilakukan secara masif demi target-target ekonomistik. Tak ada lagi norma-norma warisan nenek moyang yang dipakai. Sejak itulah, pembakaran hutan menjadi masalah signifikan (berkat ilmu teknikalisasi alam dari para sarjana).

Di titik inilah sebenarnya refleksi saya akan dimulai, ketika harus membuat catatan kecil untuk pembentukan PC ISNU di Tuban. Pembentukan ISNU pastilah dimulai dengan niatan yang baik, niatan yang mulia. Semangat untuk berkontribusi sebagai warga Nahdliyin, sebagai warga Tuban (meski beberapa di antaranya tinggal di luar Tuban), selamanya akan menjadi semangat yang terus lekang. Ini tak perlu diragukan. Namun, melakukan kontribusi dengan cara yang gegabah, yang tak hati-hati, bukan saja menjadi persoalan, bisa-bisa malah menciptakan kesengsaraan bagi orang lain.

Sarjana, dalam bahasa Bourdieu (1977), memiliki modal sosial dan habitus kecendikiawanan. Ini akan menjadi modal simbolik untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Sebab, sesungguhnya pengetahuan dan kekuasaan ibarat satu keping mata uang tak terpisahkan. *The will to know is the will to truth, the*

will to truth is the will to power. Keinginan untuk tahu adalah keinginan meraih yang benar, dan keinginan untuk benar adalah hasrat untuk berkuasa.[11]

Dalam konteks ini, maka kita perlu menggariskan, kuasa yang seperti apakah yang sahabat-sahabat ISNU bayangkan. Apakah kita akan menjadi kelompok sarjana yang mengekor pada kekuasaan yang menindas? Atau menjadi jembatan penyeimbang yang men-transformasikan kekuasaan bagi kelompok yang tertindas (*mustadh'afin*). Kalaulah ISNU hanya diniatkan sebagai seremonial agar ISNU ada di Tuban—karena daerah-daerah lainnya sudah ada lebih dahulu—maka besar kemungkinan akan banyak gerbong penumpang gelap yang masuk dalam ISNU.

Para penumpang gelap ini hanya akan menjadi pencari kekuasaan bagi dirinya sendiri. Ia masuk untuk menumpang dan mengail apapun yang bisa dikail dalam diri ISNU. Studi asosiasi-asosiasi keilmuan sejauh ini mencatat, banyak dari para sarjana (cendikiawan) hanya menjadi penjual retorika akademik, demi menjilat pantat penguasa, demi mementingkan isi perutnya. Sesuai paparan Laksono, "Retorika akademik berbuah jadi media transenden yang bersenjang dengan interaksi kepentingan (politik) nyata yang jadi laten, tersembunyi atau tertunda".[12] Inilah awal dari perselingkuhan kaum sarjana dengan penguasa yang lalim.

Perselingkuhan kaum sarjana dengan politisi, birokrat, dan pengusaha yang jahat bukan barang baru lagi. Obral

---

11 Nietzsche, F. W. (2003). *Beyond Good and Evil*. Penguin Classics.

12 Laksono, P. M. Asosiasi Ilmu-Ilmu Sosial. In V. R. Hadiz & D. Dhakidae (Eds.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (pp. 247–273). (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), hal. 249.

pendapat akademik terhadap sebuah persoalan, sudah menjadi bagian dari penghidupan sang sarjana. Inilah yang disebut Julien Benda sebagai penghianatan kaum cendikiawan, bahwa kaum cendikiawan selalu menyimpan gairah-gairah politiknya. Mereka memasukkan, bahkan menghendaki, gairah-gairah itu melebur dalam pekerjaannya sebagai cendikiawan. Karya mereka tidak mencerminkan kerja kecerdasan yang tanpa pamrih, tapi lebih mirip seperti karya politik.[13]

Jika kita tarik lebih jauh dalam sejarah kebangsaan kita, sejak zaman kolonial sekalipun, kaum sarjana (Indolog) sudah menjadi kolaborator kolonial. Merekalah yang menegakkan fondasi kolonialisme hingga ratusan tahun. Sarjana-sarjana ini yang memberikan rekomendasi, bagaimana mengatur orang pribumi hingga ke pelosok desa, agar kekuasaan Belanda terus bisa bertahan.[14]

Untuk itu, penting sekiranya kita merefleksikan diri, apakah ISNU akan hadir hanya untuk menjadi stampel kekuasaan rezim yang eksis, atau menjadi penyeimbang bagi kekuasaan yang menyimpang. Cerita tentang peselingkuhan kelompok sarjana dengan pemilik kuasa, tak Cuma muncul sebelum persoalan terjadi. Setelah persoalan hadir sekali pun, perselingkuhan itu kembali terjadi. Jebolnya lumpur Lapindo, tentu akibat salah perhitungan teknikalisasi alam para ilmuwannya. Namun, ketika lumpur meluber menenggelamkan puluhan desa, kenyataan membuktikan para ilmuwanlah yang menjustifikasi itu sebagai bencana alam, bukan akibat ulah

---

13 H.J., Benda, J. *Pengkhianatan Kaum Cendikiawan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 43.

14 Samuel, H. *Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. (Depok: Kepik Ungu dan LabSosio Universitas Indonesia, 2010), hal. 43.

perusahaan.[15] Beberapa kelompok ilmuwan ini rela dipermalukan di kalangan akademik internasional, demi sebuah kesimpulan konyol yang tak masuk akal.

Kita tentu tidak ingin menjadi kelompok sarjana yang diliputi kekonyolan. Seandainya pemegang kuasa menunjukkan penyimpangan, kita harus menjadi bagian yang menyeimbangkan. Namun, kita juga tak perlu sungkan, seandainya penguasa mengeluarkan kebijakan yang baik, kita akan mendukungnya. Ingat, dalam konteks ini, kebijakan yang menjadi ukuran, bukan personal sang penguasa. Jangan karena kesamaan identitas dan golongan sang penguasa, kita kaum sarjana kehilangan daya kritisnya.

Dari sini, saya ingin mengetengahkan penjelasan Edward Said dalam *Peran Intelektual* (2018) untuk mendefinisikan golongan seperti apakah kita ini. Para sarjana (intektual) adalah "individu yang dikaruniai bakat merepresentasikan, mengekspresikan, dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi, dan pendapatnya pada publik, menjadi seseorang yang tak gampangaan dikooptasi pemerintah atau korporasi". Sebab alasan keberadaannya (*raison d'etre*) adalah "untuk mewakili semua orang dan isu yang secara rutin dilupakan atau disembunyikan".[16]

Makna "dilupakan dan disembunyikan" adalah prinsip kehati-hatian yang harus kita pegang sebagai kaum sarjana. Tidak bisa kita hanya melihat permukaan dari sebuah persoalan.

---

[15] Gustomy, R., Menjinakkan Negara, Menundukkan Masyarakat: Menelusuri Jejak Strategi Kuasa PT Lapindo Brantas Inc. dalam Kasus Lumpur Panas di Sidoarjo. In H. Prasetia (Ed.), *Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo*. (Depok: Yayasan Desantara, 2010), .hal. 42-44.

[16] E. W. Said, *Peran Intelektual*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 8.

Kita harus menemukan realitas yang lebih dalam. Bukan untuk mendapatkan justifikasi "objektif atas sebuah kebenaran", namun meyakini bahwa landasan berpikir kita adalah terus menerus mempertanyaan apa yang dianggap benar begitu saja. Benarkah pembangunan ini baik? Benarkah kebijakan itu bermafaat bagi umat (manusia)? Benarkah kita pada jalur pembelaan terhadap mereka yang lemah? Keraguan dan kehati-hatian ini penting bagi jejak langkah seseorang yang dianggap berilmu (sarjana).

Kita tidak boleh dibutakan bahwa ilmu pengetahuan bisa menjawab segalanya. Keyakinan bahwa alam bisa di rekayasa demi memenuhi kebutuhan kita, adalah hasrat keilmuan yang harus kita koreksi. Keangkuhan atas teknikalisasi alam—dengan segala kepongahan yang kita yakini sebagai orang berilmu—adalah beban dosa yang harus segera disadari sejak awal. Ilmu yang melekat pada kita, tentu memiliki dimensi manfaat, tapi di sisi lain juga memiliki dimensi mudarat ketika kita salah menggunakannya.

Saya tidak ingin mengatakan ini adalah dosa menurut perspektif fiqh. Anggaplah ini sebagai beban dosa akademik kita sebagai sarjana saja. Jangan hanya karena di Tuban banyak sumber daya alam, kita lalu cepat-cepat merekomendasikan untuk menggalinya "demi meningkatkan kemajuan daerah". Apa makna kemajuan itu, kalau ternyata kehancuran alam tak bisa lagi dikembalikan. Tak ada anak cucu dan generasi berikutnya yang menyaksikan lagi. Lebih-lebih, jika itu harus menyingkirkan orang-orang lemah yang harusnya kita bela.

Mungkin, bertindak seperti antrolopog ada baiknya. Seorang antropolog tahu bahwa pandangannya tidak sepenuhnya objektif. "Keanggotannya dalam kelas sosial,

daerah, dan agama tertentu turut memengaruhi apa yang ia lihat dan bagaimana ia melihatnya".[17] Selama para sarjana yang berhimpun dalam PC ISNU Tuban ini mau bersikap seperti di atas, maka kita akan terjaga dari beban dosa-dosa akademik ini.

Jika beban dosa ini kita sadari sejak sekarang, *Insya Allah*, PC ISNU Tuban akan terhindar dari efek negatif para penumpang gelap. Tetapi, andaikan kita enggan menyadarinya, maka PC ISNU Tuban hanya akan terombang-ambing tanpa memberi kontribusi yang berarti. Lebih parahnya, hanya jadi mainan dan dagangan orang-orang dalam berebut kekuasaan. []

Bacaan

Benda, H. J. (1972). *Continuity and Change in Southeast Asia, Collected Journal Articles of Harry J. Benda*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies.

Benda, J. (1999). *Pengkhianatan Kaum Cendikiawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gustomy, R. (2010). Menjinakkan Negara, Menundukkan Masyarakat: Menelusuri Jejak Strategi Kuasa PT Lapindo Brantas Inc. dalam Kasus Lumpur Panas di Sidoarjo. In H. Prasetia (Ed.), *Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo*. Depok:

---

[17] Srinivas, M. N. (2017). Hidup di Desa: Sumber Pemahaman bagi Ilmuwan Sosial. *Wacana*, *36*, 183–197, hal. 196.

Yayasan Desantara.

Kleden, I. (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.

Laksono, P. M. (2006). Asosiasi Ilmu-Ilmu Sosial. In V. R. Hadiz & D. Dhakidae (Eds.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (pp. 247–273). Jakarta: Equinox Publishing.

Matanasi, P. (2017). Kejamnya Penggusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan. Retrieved January 17, 2019, from https://tirto.id/kejamnya-penggusuran-warga-kedung-ombo-dengan-dalih-pembangunan-cBfv

Nietzsche, F. W. (2003). *Beyond Good and Evil*. Penguin Classics.

Said, E. W. (2018). *Peran Intelektual*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Samuel, H. (2010). *Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu dan LabSosio Universitas Indonesia.

Srinivas, M. N. (2017). Hidup di Desa: Sumber Pemahaman bagi Ilmuwan Sosial. *Wacana*, *36*, 183–197.

Bagian 6

PERAN ISNU DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh:

M. Yusuf Aminuddin, S.Pd.I., M.Pd.

Revolusi industri yang ditandai dengan lahirnya digitalisasi di seluruh kegiatan manusia, organisasi dan kelembagaan hampir tidak bisa dilawan. Kehadiran revolusi industri ini sebenarnya telah masuk zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Saat itu, revolusi industri pertama hadir dalam konteks *steam engine* atau mesin uap. Disusul dengan revolusi industri yang kedua yakni ditandai dengan pemanfaatan mesin otomotif di lini produksi Indonesia era pemerintahan Hindia-Belanda. Revolusi industri ketiga diawali tahun 1990-an yang dimulai oleh otomatisasi saat terjadi globalisasi. Dan saat inilah lahir globalisasi digitalisasi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2020 di Negara ASEAN yang menjadi penanda revolusi industri yang keempat. Negara Jerman menyebutnya dengan industri 4.0, di mana semua lini kehidupan masyarakat bergantung pada akses digitalisasi.

Revolusi industri yang keempat inilah menjadi kekhawatiran kita, dimana masyarakat kita akan menjadi negara

konsumtif penggunaan digitalisasi tanpa menghiraukan tantangan dan peluang bagi generasi emas mendatang, satu contoh penggunaan *gadget* yang berlebihan bagi anak-anak kita hari ini dengan bermain *game online* yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai sosial, keluhuran dalam beradab dan menurunnya tingkat belajar dan membaca anak-anak, sehingga revolusi industri membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan generasi bangsa Indonesia khususnya bagi generasi yang tidak bisa mengambil *hikmahnya* atau melakukan *filter* terhadap bentuk perubahan ini.

Sebagai Sumber Daya Manusia yang terdidik, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama' (ISNU) seharusnya mampu mampu menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Dilihat dari segi organisasinya NU merupakan organisasi masa terbesar di Indonesia, maka Nahdlatul Ulama' memiliki kewajiban penting dalam menyiapkan kadernya untuk menghadapi revolusi industri 4.0 melalui banomnya yakni Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama' (ISNU). Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, ISNU melalui kadernya yang juga bisa disebut Kaum Intelektual atau Cendekiawan Muslim ini, harus melek teknologi dan mengambil peluang untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0. Terdapat berbagai strategi dalam menghadapi era industri 4.0 ini di antaranya:

Pertama, ISNU harus menyediakan Tenaga Ahli Edukatif dalam berbagai Bidang. Sebagai kader ISNU harus mampu meningkatkan profesionalitas bidang kita masing-masing, jika kita ahli dalam bidang manajemen maka kita bisa menjadi tenaga ahli edukatif bidang manajemen, jika kita ahli dalam bidang ekonomi kita bisa menjadi tenaga ahli edukatif bidang ekonomi di lapisan masyarakat kita.

Kedua, ISNU harus mondorong Inovasi Produk dari *Output* Pesantren, Sebagai kader ISNU harus mempu melakukan inovasi keunggulan dan kreativitas seni serta produk dalam Pesantren. Sehingga kedepan pendidikan di pesantren tidak melulu belajar Ke-agamaan akan tetapi terdapat penyiapan kemampuan santri untuk menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi, hal ini bisa dilakukan jika pengetahuan pemanfaatan teknlogi dan pengetahuan dikuasi dengan baik. Sebagai contoh 1) Pesantren Sidogiri, memiliki berbagai keunggulan salah satunya memiliki Koperasi pondok Pesantren yang telah berdiri diberbagai cabang jawa timur, berikutnya terdapat inovasi produk air mineral dengan kemasan "santri" dan dikelola oleh santri dan alumninya sendiri; 2) Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, selain sosoknya sebagai lembaga pendidikan Islam terdapat belajar mengajar kitab, pesantren ini juga memiliki keunikan yaitu memproduksi Kopi dari biji pilihan yang telah tersebar di Indonesia dengan jenis "kopi mahkota raja" dan pesantren ini punya sebutan "Pesantren Agrobisnis dan Agrowisata" yang diproduksi oleh santri dan alumni sendiri. Maka dari itu peran Cendekiawan ISNU harus mampu memberikan gambaran khusus kepada pengelola pesantren agar dapat meningkatkan kemandirian santri dan bekal hidup kedepannya nanti.

Ketiga, ISNU harus mampu Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Jaringan Kerja untuk menghadapi revolusi industri 4.0 melalui Penguatan Ekonomi Rakyat. Sebagai Kader ISNU, kita harus kreatif dalam memberikan penguatan ekonomi rakyat indonesia, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan jaringan kerja bagi warga masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Di samping itu sebagai cendekiawan muslim kita harus berupaya memberikan

penguatan ekonomi rakyat melalui pendampingan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, perdagangan, pertanian dan lainnya di pedesaan secara langsung untuk memberikan penguaatan ekonomi rakyat, sehingga mereka optimis dalam menjalani profesinya sebgai pelaku usaha, petani dan sebagainya.

Keempat, ISNU harus menjadi Fasilitasi Minat Baca atau Literasi bagi Masyarakat Desa. Salah satu kendala terbesar masyarakat pedesaan adalah minat baca atau literasi yang rendah terutama terhadap hal-hal yang sifatnya baru (inovasi). Sedangkan penguasaan IT menjadi kunci menghadapi persaingan ketat. Sebagai Intelektual ISNU kita wajib memberikan fasilitasi minat baca masyarakat agar kreatifitas dan inovasi mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan zaman, bukan diam-diaman tidak mau menumbuhkembangkan yang selalu dibilang sudah nyaman, padahal kenyataannya mereka sedang diberikan tantangan yang besar dengan perubahan zaman. Apalagi musim sudah tidak menentu melihat gelombang pertanian pedesaan tadah hujan, maka saatnya gerakan literasi bagi masyarakat desa perlu digalakkan agar mereka mampu berinovasi misalnya dengan membuat laboratorium pertanian, alat pemantau tanaman, dan sebagainya.

Kelima, ISNU harus bisa Menjadi Pelopor Model Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Favorit. Melihat alumni perguruan tinggi keislaman di Indonesia Mayoritas adalah Kader Muda NU, ratusan yang sudah menjadi Guru besar (Profesor) ada yang jadi Doktor dan ada juga Dosen yang aktif dalam Konsultan Pendidikan Islam, dari berbagai temuan tersebut menjadi nilai plus bagi ISNU ketika mau berkiprah menjadi pelopor model sekolah Islam dan Perguruan Tinggi Islam yang Favorit, sehingga tidak terdoktrin oleh aliran-aliran lainnya

maupun *hoax* yang berkedok radikalisme beragama di perguruan tinggi tersebut, tetap mempertahankan ke-Nu-an kita dalam tradisi budaya kelembagaan yang santun, ramah dan menyejukkan.

Keenam, ISNU harus menjadi Strategi Pengoptimalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai institusi tertinggi ditingkat pendidikan, Perguruan tinggi memiliki peran tugas dan fungsinya yakni, 1) Pendidikan; 2) Penelitian; dan 3) Pengabdian pada Masyarakat. Dengan Tri dharma Perguruan tinggi ini, Kader ISNU yang masih berada di Perguruan Tinggi atau yang berstatus sebagai Dosen merupakan strategi yang sangat ampuh dalam pengoptimalan tri dharma perguruan tinggi, di mana sebagai akademisi harus melaksanakannya dengan menjadikan tri dharma perguruan tinggi itu sebagai motor penggerak kerangka kerja ISNU yang kompetitif dikalangan akademis, sehingga dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dapat dilakukan sejak kuliah dan sampai mereka menjadi sarjana agar dapat mengisi peran pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketujuh, ISNU harus selalu Menjalin *Networking dengan Stakeholders Setempat.* Sebagai kader ISNU kita harus selalu bisa menjadi *partner* berpikir yang seimbang bagi seluruh pemangku kebijakan, baik di pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, pesantren atau organisasi lainnya yang berpengaruh disuatu daerah tertentu agar dapat menjadi penyeimbang bagi pemimpinnya dalam menjalankan program kerjanya.

Berdasarkan kerangka yang telah penulis paparkan di atas, dapat di analisa secara singkat bahwa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 peranan Nahdlatul Ulama' sebagai ormas terbesar di Indonesia melalui salah satu badan otonomnya yaitu

ISNU sangat besar, di antaranya terdapat tujuh strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tersebut. ISNU menjadi penting bagi kemajuan zaman ini, meskipun dibilang badan otonom termuda di Nahdlatul Ulama', ISNU sudah dapat mengkristalisasi program-program terbaiknya untuk kemaslahatan umat berbangsa dan bernegara. Sehingga hadirnya ISNU akan mewarnai corak kehidupan bangsa. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama' (ISNU) ke depan akan terus selalu berupaya mendorong inteletual atau cendekiawan islam untuk bangkit membangun kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Bagian 7

INTEGRASI PESANTREN DAN SEKOLAH DI INDONESIA

Oleh:

Mutamakin, MA.

Pendahuluan

Perkembangan pendidikan di Indonesia, wabil khusus pendidikan Islam, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar pondok Pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berkembang jauh lebih awal di bumi Nusantara dibanding dengan lembaga pendidikan formal yang baru mulai dikenal pada masa kolonialisme. Pesantren tumbuh dan berkembang sesuai dinamika sosio-kultural yang mengitari masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, pesantren masih eksis di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dengan adaptasi sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren seringkali disebut sebagai institusi pendidikan *indegenous* Indonesia yang berbeda dengan pola

pendidikan di negara manapun.[18] Di antara karakteristik pendidikan di pesantren adalah penekanan terhadap pentingnya ilmu pengetahuan agama dan pembinaan spiritualitas, sebab agama dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan dan norma kehidupan.[19]

Seiring dengan perkembangan zaman, di Indonesia berkembang lembaga pendidikan formal yang memperkenalkan sistem pendidikan modern. Pendidikan formal dengan sistem yang terstruktur dan berjenjang ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan di negara-negara maju dangan kurikulum dan pola pendidikan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, lembaga pendidikan formal ini tumbuh dan berkembang pesat mulai tingkat dasar (SD), menengah (SMP) dan (SMA) serta Perguruan Tinggi (Universitas). Dalam kurikulumnya pendidikan formal tersebut lebih menekankan pada materi ilmu pengetahuan (sains) secara umum, meskipun di dalamnya memasukkan materi pendidikan agama namun hanya sebatas pengenalan dalam satu mata pelajaransaja (PAI).

Dewasa ini, pesantren dan sekolah pun telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bahkan, pesantren telah mengolaborasikan sistem sekolah dalam kurikulumnya ke dalam sistem madrasah. Madrasah merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menjawab kebutuhan atas institusi pendidikan formal dengan menekankan pada mata pelajaran berbasis agama. Institusi ini tidak hanya menjadikan

---

[18] Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan,* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 3.

[19] Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos,1999).

pelajaran agama hanya satu mata pelajaran, tetapi dirumuskan secara berimbang antara pelajaran sekolah umum dan juga sistem kurikulum pesantren. Maka dapat dikatakan, di sinilah terwujud upaya integrasi antara kurikulum pesantren (ilmu keagamaan) dan sekolah (sains).[20] Akan tetapi, pesantren dengan karakteristik pondoknya (asrama), tetap menjadi ciri khas tersendiri sehingga kehadiran madrasah dinilai hanya untuk menjembatani bagi para santri untuk mendapatkan legalitas dari pendidikan yang ditempuh. Dengan demikian, pesantren dan sekolah merupakan lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam pendidikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pesantren telah memiliki akar kultural dan basis historis yang cukup kuat di masyarakat Indonesia dan tradisi pengembangan ilmu, sedangkan sekolah sebagai institusi modern telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan pendidikan sains-tehnologi kepada masyarakat.[21]

Meski demikian, *output* dari kedua lembaga itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan pasca kelulusan. Terjadi dikotomi dengan jurang pemisah yang cukup dalam, seperti perbedaan ketika menghadapi dunia kerja. Hal ini tidak lepas dari suatu paradigma bahwa lulusan pesantren lebih berorientasi pada pekerjaan di bidang yang terkait sosial dan keagamaan, sedangkan lulusan sekolah bisa mengisi sektor-sektor industri. Memang, perbedaan basis pendidikan dari dua institusi ini tampak sangat mencolok. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, di mana lembaga pendidikan agama seakan hanya mempersiapkan peserta didiknya untuk mengetahui pengetahuan agama belaka,

---

[20] Nurhayati Jamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008). hal.176-180.
[21] Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim,* hal. 87-89.

sedangkan sekolah umum yang menekankan sains-tehnologi hanya membekali nilai-nilai keagamaan (*religious values*) yang sangat minim dan terbatas.

Dikotomi agama dan ilmu (sekularisasi) itu berlangsung sejak revolusi industri di Eropa dan era kemunduran umat Islam pada abad pertengahan. Sebab itu, banyak ilmuwan Muslim kontemporer yang mengokohkan kembali perihal pentingnya agama dan sains bagi peradaban manusia. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, wacana integrasi ilmu agama dan sains ini mulai mendapatkan perhatian sejak 1990-an. Hal ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah banyak dielaborasi oleh pemikiran-pemikiranala Barat.

Saat ini, buah pemikiran dari para cendekia dalam upaya integrasi agama dan ilmu telah banyak diterapkan pada dua lembaga itu sekaligus. Hal ini terlihat dengan hadirnya SMP dan SMA di lingkungan pesantren dengan pola penerapan kurikulum sebagaimana yang berlaku di sekolah umum luar pesantren, sedangkan pendidikan agama, dirumuskan tersendiri mengikuti kurikulum pesantren secara khusus. Contoh lain integrasi yang berlaku di sekolah ialah munculnya sekolah-sekolah dengan label Islam Terpadu (IT) yang mulai merambah di berbagai daerah perkotaan di Indonesia.[22]

Tulisan ini, hanya akan membahas dari contoh integrasi yang pertama, yakni integrasi pesantren-sekolah. Hal ini cukup menarik sebab pesantren dengan karakteristik dan motede belajar yang telah diterapkan cukup lama harus mengalami

---

[22] Suyatno, *Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam volume 2, Desember 2013, hal. 355-375.

reaktualisasi, baik dari sisi pembenahan kurikulum pesantren maupun tenaga pendidiknya. Adanya perjumpaan tersebut tentu menyumbangkan sebuah perkembangan baru yang patut untuk dikaji guna mengetahui lebih dalam perihal konsep integrasi dan praktiknya dipesantren.

Dalam konteks modern, menjadikan pesantren cum-sekolah sebagai pusat pengembangan keimanan dan keilmuan, tentunya merupakan inovasi yang patut diapresiasi. Pesantren bisa menjadi sebuah laboratorium bagi sistem pendidikan di mana transmisi ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya harus selalu dievaluasi, diperbaharui, dikritik dan dikaji secara terbuka agar tidak terjadi apa yang disebut *expired knowledge* karena tidak mampu merespon problematika masyarakat kontemporer. Bahkan, pesantren yang terintegrasi dengan sekolah juga mampu mempertahankan ciri khas nilai-nilai kepesantrenannya. Dengan mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki pesantren tersebut, maka sangat mungkin pesantren terpadu dilirik sebagai lembaga pendidikan alternatif di tengah pengapnya sistem sekolah dewasa ini.[23] Oleh sebab itu, kajian bertemakan integrasi tersebut dipandang masih patut dilakukan. Untuk itu, tulisan ini akan lebih memfokuskan pada kajian tentang (1) mengapa pesantren melakukan integrasi dengan sekolah dan (2) dinamika apa yang terjadi dari hasil perpaduan tersebut? Hasil dari kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan pemikiran pendidikan kontemporer di Indonesia.

---

[23] A. Malik Fajar, "Sintesa Perguruan Tinggi Dan Pesantren Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif", dalam Mudjia Rahardjo (ed.), *Quo Vadis Pendidiakn Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pembangunan* (Malang: Cendikia Paramulya, 2002), hal. xiii.

Pola Interaksi Agama – Sains

Pendalam agama (*tafaqquh fi al- din*) semata. Ilmu-ilmu mengenai Al-Qur'an, hadist dan turunan-turunannya (termasuk ilmu *tarbiyah*) diberi label ilmu-ilmu agama, sementara ilmu astronomi, botani, kimia, fisika, matematika, sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan sebagainya dianggap sebagi sains atau ilmu umum, dianggap sekuler atau duniawi belaka.

Pendidikan Islam umumnya diartikan sebagai pendalam agama (*tafaqquh fi al- din*) semata. Ilmu-ilmu mengenai Al-Qur'an, hadist dan turunan-turunannya (termasuk ilmu *tarbiyah*) diberi label ilmu-ilmu agama, sementara ilmu astronomi, botani, kimia, fisika, matematika, sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan sebagainya dianggap sebagi sains atau ilmu umum, dianggap sekuler atau duniawi belaka.

Persoalan baru muncul kepermukaan ketika aktivitas ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam dihadapkan pada refleksi krisis kesejahteraan umat Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan umum dan teknologi yang begitu pesat. Hal ini menimbulkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Diakui atau tidak, dinamika perubahan sejarah peradaban manusia merupakan akibat langsung dari prestasi umat manusia dalam bidang sains dan teknologi. Dalam batas-batas tertentu, perkembangan sains-tehnologi dirasakan oleh banyak agamawan sebagai tantangan riil, bahkan ancaman bagi kelestarian nilai-nilai kehidupan agama dan budaya yang dari dahulu dipelihara dan diawetkan secara kultural oleh para agamawan dan budayawan di seluruh dunia.[24]

---

[24] M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama*, hal.69-70.

Dikotomi ilmu-ilmu *naqliyah- aqliyah* memiliki akar sejarah yang panjang, dan rujukan teks agama yang melimpah, sehingga pendidikan Islam diyakini sudah lengkap dan komprehensif dan holistik (*syumuli*) dan cukup dengan dirinya sendirinya (*self-sufficient*). Ilmu Pengetahuan tentang Islam dianggap sebagai Islam itu sendiri, tidak memerlukan pemikiran ulang dan pembaharuan melalui interaksi, dialog dan pemerkayaan. Padahal Islam sebagai agama dan islam sebagai ilmu pengetahuan tidak selalu identik. Hal ini telah dibuktikan oleh para pemikir Islam masa lalu (era kejayaan Islam) yang menjadikan Islam sebagai fondasi dan spirit bagi pengembangan ilmu pengetahuan (sains tehnologi).

Era globalisasi dapat dipahami sebagai satu keadaan yang ditandai oleh adanya penyatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan lain sebagainya, yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya, tanpa kehilangan identitas masing-masing. Penyatuan ini terjadi berkat kemajuan teknologi informasi yang dapat menghubungkan atau mengomunikasikan setiap isu yang ada pada suatu negara dengan negara lain.[25] Dengan demikian, bahwa perspektif integrasi pengetahuan merupakan pendekatan kontemporer yang mampu menjawab problem dikotomi antara agama dansains.

Gambaran di atas membuktikan bahwa relasi agama dan sains memang bersifat integratif. Dalam pandangan Ian G. Barbour, ada tiga model integrasi.[26] Pertama, *natural teologis* yang menyebutkan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dari

---

[25] Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), hal. 10.

[26] Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan: antara Sain dan Agama*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 29-38

keberadaan alam sebagai karya Tuhan. Kedua, *teologis natural* yang memandang bahwa sumber utama teologi bersumber diluar sains, namun pendangan ini juga berpendapat bahwa doktrin tradisional harus tetap dirumuskan ulang dalam pandangan sanis terkini. Ketiga, *sintesis sistematis* yang memandang hubungan agama dan sains sebagai hubungan yang lebih sistematis yang lebih koheran dalam kenyataan kehidupan manusia, alam, danTuhan.

Penerjemahan perspektif integratif tersebut dalam pendidikan juga memiliki pendekatan tersendiri. Beberapa ilmuwan Indonesia yang telah mengembangkan perspektif ini, seperti Amin Abdullah dengan teori jaring laba-laba atau integrasi-interkoneksi. Menurut Amin Abdullah, integrasi antara ilmu agama dan sains perlu dilakukan melalui pola interkoneksitas guna menguatkan paradigma epistomologinya. Perspektif ini memandang bahwa ilmu memiliki jenjang jejaring yang saling terkait antara satu bidang dengan bidang lainnya. Dalam pandangan Amin, interkoneksitas digunakan sebagai "usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. Sehingga setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun ke-alam-an tidak dapat berdiri sendiri, maka dibutuhkan kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling ketersambungan antar disiplin keilmuan."[27]

Maka secara tidak langsung pendekatan yang demikian itu ialah untuk menguatkan satu bidang ilmu dengan bidang lainnya sehingga pemahaman dan penguasaan keilmuan teritegrasi

---

[27] M. Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. vii-viii.

secara sempurna. Dari perspektif Amin ini, setidaknya dapat diketahui tiga corak pendekatan keilmuan umum dan agama, yakni paralel, linier, dan sirkuler.[28] *Pertama*, pendekatan paralel, yaitu masing-masing corak keilmuan umum dan agama berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara satu dengan yang lainnya. *Kedua,* pendekatan linier, yakni salah satu dan keduanya akan menjadi primadona, sehingga ada kemungkinan berat sebelah. *Ketiga*, pendekatan sirkular, yaitu masing-masing dapat memahami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan pada masing-masing keilmuan dan sekaligus dapat saling mengisi dan memperbaiki dari kekurangan masing-masing.

Salah satu contoh dalam perspektif Amin Abdullah ini ilmu ekonomi syari'ah. Dua bidang keilmuan yang awalnya terpisah tetapi mampu bersatu dengan landasan teori yang diambil dari disiplin keilmuan Islam yang sudah berkembang, seperti teori dan praktik bagi hasil (*al-Mudharabah*) dan kerja sama (*al-Musyarakah*). Dalam hal ini, keilmuan Islam menjadi dasar bagi objektivitas keilmuan yang berlandaskan pada norma agama. Dengan pola yang sama, maka keilmuan Islam juga bisa diterapkan dalam disiplin ilmu yang lebih luas lagi, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, kesehatan, teknologi, ekonomi, politik, hubungan internasional, hukum dan peradilan dan seterusnya.[29]

Maka, dalam tulisan ini, dua perspektif integrasi dan interkoneksi Amin Abdullah menjadi landasan teori yang penulis gunakan untuk melihat dinamika integrasi pesantren dan sekolah dalam pendidikan kontemporer di Indonesia. Pemilihan

---

[28] *Ibid*., hal. 219-223
[29] *Ibid*., hal. 105

keduanya berdasarkan praktik-praktik yang saat ini berkembang dalam tradisi keilmuan di Indonesia, khususnya terintegrasinya pendidikan agama dengan pendidikan lainnya seperti yang dipraktikan dalam pendidikan Islam Terpadu dan transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Univeristas Islam Negeri (UIN).

Dinamika Integrasi Pesantren dan Sekolah Kontenporer

Perkembangan pesantren yang sangat pesat hingga saat ini tidaklah lepas dari adanya sistem pendidikan mapan dan kurikulum yang terencana dengan baik. Karena kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, maka perlu adanya perencanaan dalam penerapannya, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, akan sulit untuk mencapai semua tujuan dan sasaran pendidikan yang telah dicita-citakan.

Paradigma pendidikan pesantren yaitu pendidikan yang sesuai dengan norma Islam dan selalu bersifat *tafaqquh fial-diin*. Paradigma tersebut masih tetap dipertahankan walaupun bentuk-bentuk pendidikannya telah berkembang pesat. setidaknya ada dua pembagian dari bentuk pesantren yang berkembang saat ini, yakni pesantren tradisional (*salaf)* dan pesantren modern (*khalaf)*.

Pondok pesantren *salaf* atau juga sering disebut dengan *salafiyah* adalah pondok pesantren yang metode pembelajaran menggunakan pendekatan tradisional sebagaimana bentuk awal pesantran. Pengertian pesantren s*alafi* yang lebih simpel adalah pesantren yang tetap mempertahankan sistem (materi pengajaran) yang menggunakan sumber kitab-kitab klasik Islam atau kitab kuning dengan huruf Arab gundul (tanpa baris

apapun).[30] Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab. Jenjang pendidikan bagi para santri dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan santri dalam menguasai bahasa Arab dan kitab-kitab yang dipelajari. Tingkatan kitab-kitab yang dipelajari berdasarkan tingkat pembahasannya sehingga apabila seorang santri telah dianggap selesai memahami satu kitab yang lebih ringan, barulah diperbolehkan untuk pindah pada pengajian kitab yang lebih tinggilagi.

Pesantren salafiyah ini merupakan lembaga pendidikan non formal yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama yang bersumber pada kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik, maka materi kurikulumnya mencakup ilmu *tauhid, tafsir,* ilmu *tafsir, Hadits,* ilmu *haits,* ilmu *fiqh, ushul fiqh* ilmu *tasawuf*, ilmu *akhlak*, bahasa arab yang mencakup *nahwu, sharaf, balaghah, badi', bayan mantiq,* dan *tajwid*.[31] Pola yang demikian ini, dalam pendidikan modern, sering disebut pembelajaran secara tuntas karena pembelajarannya terhadap satu bidang ilmu secara tuntas.[32]

Adapun pesantren *khalafiyah* atau modern adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui sutuan pendidikan formal, baik madrasah (SD, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMU dan SMK), atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok pesantren modern dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan,

---

30 Muhammad Ya'cub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Desa* (Bandung: Angkasa, 1984), h. 23

31 Anhari Masjkur, *Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren*, hal. 24

32 Departemen Agama RI., *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya*(Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 29-30.

dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu, seperti catur wulan, semester, tahun/kelas dan seterusnya. Pada pondok pesantren *khalafiyah*, "pondok" lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa beberapa pesantren tetap berjalan meneruskan tradisi yang diwarisinya secara turun-temurun, tanpa ada perubahan dan inovasi yang berarti, kecuali sekadar bertahan. Namun ada juga pesantren yang mencoba mencari jalan sendiri, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu singkat. Pesantren semacam ini adalah pesantren yang kurikulumnya berdasarkan pemikiran akan kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya.

Seiring dengan perkembangan peradaban, perubahan begitu tampak terjadi dalam pola relasi pesantren dengan sekolah, pada titik ini pesantren sudah mengambil bentuk dialog. Terutama pada masa era orde baru, di mana sekolah yang mengkaji ilmu-ilmu umum sebagai bekal kehidupan di tengah masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan sains-tehnologi, juga sudah dimasukkan ilmu-ilmu dasar keagamaan seperti yang diajarkan di pesantren. Namun demikian, intensitasnya yang tertuang dalam kurikulum masih memiliki penekanan yang berbeda-beda. Akan tetapi pola dialog yang terjadi dalam relasi pesantren dan sekolah, pada waktu tertentu sering mengarah pada independensi yang berlebihan, dan terkadang dialog tersebut hanya menjadi isapan jempol belaka, mengawang jauh di atas awan.

Meskipun demikian, semua perubahan itu, sama sekali tidak mencerabut pesantren dari akar kulturnya. Secara umum

pesantren tetap memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu pengetahuan agama (*tafaqquh fi addin)* dan nilai-nilai Islam (*Islamic values).* (2) Lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial (*social control).* (3) Lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial *(Social engineering).* Perbedaan-perbedaan tipe pesantren di atas hanya berpengaruh pada bentuk aktualisasi peran-peran ini. Sedangkan bentuk integrasi yang dilakukan oleh pesantren modern adalah upaya untuk mempertahankan eksistensi dan peran pesantren dalam membantu mendidik masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan sistem pesantren dan sekolah merupakan partner yang ideal bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang *qualified* dan berakhlakul karimah. Untuk dapat memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, mensyaratkan pesantren dan sekolah harus bersinergi dalam meningkatkan mutu sekaligus memperbarui model pendidikannya. Sebab, model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan banyak membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama dan etika, sains dan kecakapan teknologis, tanpa disandingkan dengan sekolah secara holistik dan komprehensif serta profesional.

Meskipun dewasa ini pelopor sains dan teknologi didominasi dunia Barat, namun dampaknya begitu kuat dan keras yang dirasakan oleh umat manusia secara global. Hal itu dapat menyeret seluruh umat manusia, termasuk bangsa

Indonesia kedalam persoalan bagaimana mendudukkan kembali sains dan teknologi yang dilandasi dengan nilai agama dan moral serta etika.

Cita-cita luhur untuk mewujudkan integrasi sains-agama, pesantren dan sekolah ini bukan tanpa problem. Dalam praktiknya, pesantren merupakan induk dari lembaga-lembaga sekolah yang berada di dalamnya. Sedangkan lembaga tersebut rata-rata masih bertahan dengan model pengajian yang bersifat sorogan, madrasah diniyah, madrasah yang berafiliasi pada Kemenang dan sekolah yang berafiliasi pada Kemendiknas. Konsekuensi dari dikotomi ini adalah secara umum kurikulum pesantren itu tidak berlaku sama bagi setiap lembaga-lembaga dan tentu juga tidak dapat dinikmati oleh seluruh santri. Misalnya, santri yang terdaftar sebagai siswa di lembaga SMP atau SMA diwajibkan untuk menjadi siswa di madrasah diniyah sebagai pengimbangan antara pelajaran umum dan pejalaran agama, atau bentuk integrasi pendidikan.[33]

Dalam tradisi pesantren, kitab kuning merupakan ciri dan identitas yang tidak bisa dilepaskan[34] sehingga siswa-siswa belajar di sekolah formal juga dituntut bisa membaca dan memahami kitab kuning. Hal ini tentu menjadi problem tersendiri bagi dunia pesantren dalam mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang diterapkannya sebab tenaga pengajar juga dituntut profesional dan mumpuni dalam bidang keilmuannya. Kurikulum madrasah diniyah merupakan kurikulum murni pesantren yang tidak terikat oleh kementrian agama maupun pendidikan nasional. Sedangkan dalam

---

[33] Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20 : Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.320.

[34] Martin Van Brunessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 17.

perspektif integrasi pesantren dan sekolah, madrasah diniyah ini melengkapi pengetahuan agama dari pengetahuan ilmu yang didapatkan di sekolah. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam dinamika integrasi pesantren dan sekolah. Sedangkan rumusan kurikulum yang ideal, dalam perspektif integrasi, harus memasukkan agama dan pengetahuan secara komprehensif dalam satu kesatuan kurikulum dari lembaga pendidikan agar memiliki kurikulum yang aktual, responsif terhadap tuntutan permasalahan kontemporer. Artinya lembaga melahirkan lulusan yang visioner, berpandangan integratif, proaktif dan tidak dikotomik dalam keilmuan.[35]

Perumusan dan penyusunan kurikulum pesantren berbasis integrasi keilmuan ini memelukan pendekatan filosofis yang mampu menjembatani keduanya. Dengan demikian, maka upaya yang dilakukan oleh pesantren modern untuk mengintegrasikan keilmuan tersebut baru sebatas integrasi kelembagaan, belum intergarasi dalam kurikulum. Sekolah-sekolah formal yang dulunya berada di luar pesantren, diadopsi dan diterapkan juga di lingkungan pesantren dengan penerapan kurikulum sesuai standarisasi yang buat oleh pemerintah, perbedaannya hanyalah pada jam belajar dari kedua. Sehingga pembekalan ilmu dan agama tersebut tidak memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif pada peserta didik. Apalagi kenyataannya, ilmu-ilmu tersebut sering disampaikan oleh guru yang kurang mempunyai wawasan keislaman dan kemodernan yangmemadai.[36]

---

[35] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 273

[36] Khudori Sholeh, *Pokok Pikiran tentang Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama dalam Intelektualisme Islam: Melacak Akar-akar Integrasi Ilmu dan Agama*, (Malang: LKQS UIN Malang, 2007), hal. 231

Sedangkan menurut Amin Abdullah, integrasi memerlukan interkoneksi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin lainnya, bukan hanya sekedar kehadiran lembaga itu dalam satu naungan lembaga yang besar melainkan landasan antara kurikulum dalam satu lembaga memiliki keterkaitan atau memiliki landasan filosofis yang terintegrasi. Maka apabila dilihat dari sudut pandang kelembagaan, masuknya sekolah ke dalam pesantren adalah bagian dari integrasi interkoneksi kelembagaan, tetapi belum menjadi bagian dari integrasi-interkoneksi kurikulum secara holistik. Integrasi yang dilakukan ini pada umumnya hanya dengan sekadar memberikan ilmu agama dan sains secara bersama-sama tanpa disertai pemahaman integrasi satu sama lain, apalagi dilakukan di atas dasar filosofis yang mapan. Hal ini tentu masih menjadi dilemma dalam pengembangan pendidikan dipesantren.

Epilog

Dalam merespon perkembangan masyarakat kontemporer, Pesantren telah melakukan upaya intergrasi sekolah di dalam lingkungan sebagai bentuk eksistensi guna menjawab tantangan zaman. Hal ini perlu dilakukan, sebab problematika umat tidak hanya memerlukan pandangan dan solusi normatif belaka, melainkan juga perlu adanya kajian berkelanjutan seiring dengan perkembangan sains-tehnologi itu sendiri. Karena itu, kehadiran sekolah dalam pesantren adalah upaya yang tepat untuk mewujudkan masyarakat berdasarkan iman dan taqwa dengan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer.

Pesantren juga dituntut memiliki tenaga pendidik dengan latar belakang keilmuan yang lebih lengkap, tidak hanya sekedar berpengetahuan agama ataupun sains belaka. Meski demikian, upaya integrasi keilmuan yang terjadi di lingkungan pesantren masih bersifat integrasi kelembagaan saja. Sebab dalam praktiknya, ilmu agama yang dimiliki oleh para santri tidak menjadi satu kesatuan dalam kurikulum sekolah dalam pesantren, melainkan kurikulum tambahan yang menjadi ciri khas pesantren. Dari uraian terdahulu dapat dilihat bahwa dinamika integrasi pesantren dan sekolah masih mengalami problem substansial dalam upaya integrasi antar disiplin ilmu, *wabil khusus* antara agama dengan sains-tehnologi, sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk dapat menjembatani dan merumuskan solusinya.

Bacaan

A Malik Fajar, "Sintesa Perguruan Tinggi Dan Pesantren Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif", dalam

Mudjia Rahardjo (ed.), *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pembangunan,*Malang: Cendikia Paramulya. 2002.

Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Anhari Masjkur, *Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren*, Surabaya: Diantama, 2007.

Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana, 2012.

Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam,*Jakarta: Logos. 1999.

Departemen Agama RI., *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003

Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren,* Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 2000.

Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan: antara Sain dan Agam*a, Bandung: Mizan, 2004

Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,*Jakarta: LP3ES, 1989.

Khudori Sholeh, *Pokok Pikiran tentang Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama dalam Intelektualisme Islam: Melacak Akar-akar*

Integrasi Ilmu dan Agama, Malang: LKQS UIN Malang, 2007.

M. Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkonektif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religious*, Jakarta: PSAP.

M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan,,* Jakarta: LP3ES, 1995.

Martin van Brunessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995

Muhammad Ya'cub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Desa,* Bandung: Angkasa,1984.

Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* Jakarta: Paramadina, 1997.

Nurhayati Jamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Rajawali Pers,2008.

Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2008.

Suyatno, *Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Pendidikan Islam volume 2, Desember 2013.

Bagian 8

ISNU BERKHIDMAT UNTUK NKRI

Oleh:

Mutholibin, S.Pd.I.

Kembalinya para sarjana Nahdlotul Ulama ke tanah kelahirannya sebagai bentuk pengabdian dan sumbangsih nyata terhadap perkembangan keintelektualan sosok sarjana untuk kemajuan kota ataupun desanya. Hal ini dikarenakan kedatangan sarjana sarjana muda sangat di tunggu oleh masyarakat dalam pembangunan dalam bidang yang ia kuasai sewaktu kuliah.

Dengan perkembangan zaman yang terus maju dengan digital di mana semua aktivitas manusia tidak mengenal ruang dan waktu, di sinilah manusia di tuntut untuk mandiri dan mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Banyak sekali yang harus dilaksanakan oleh ISNU dalam membangun bangsa

ini mulai dari sisi ekonomi, budaya dan politik, sosial, hukum maka kehadiran ISNU sangat di harapkan oleh Nahdliyin.

ISNU harus menjadikan dirinya sebagai wahana bagi transformasi sosial budaya untuk menanamkan semangat kebangsaan Indonesia. Akibat dari ini, ISNU dan seluruh umat Islam mampu berperan mejaga keutuhan bangsa. kemudian ISNU harus dapat pula mentransformasikan sosial politik di mana Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai Ideologi Negara tidak terdapat kesenjangan yang esensial. Selanjutnya ISNU harus mampu mentransformasi sosial ekonomi, maksudnya adalah ISNU harus mampu memberikan sumbangsih yang besar terkait dengan kebangkitan ekonomi di daerahnya dan mampu membuat lapangan kerja sendiri untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Jadi ISNU tidak waktunya mengurusi Tahlil saja. Karena Tahlil bukanlah sesuatu yang baru. Soal tahlil nggak usah menjadi program yang organisasi ISNU. Tnpa organisasi ISNu, tahlil akan berjalan teruis. Masdar Farid Mas'udi mengatakan Tahlil itu kultur, jadi tak akan pernah habis. Kalau dengan tahlil ada ketenangan bathin, itu sukarela, tanpa harus di urus ISNU juga bisa jalan karena tahlil merupakan elemen-elemen budaya yang memberikan sesuatu kepada ketenangan bathin manusia yang menjalankan. (Baca Masdar Farid Mas'udi: PMII dan Logika Baru).

ISNU Tuban sangat dibutuhkan kontribusinya dalam membangun masyrakat yang penuh problema sosial yang terus di kosumsi oleh masyarakat Tuban mulai dari isu toleransi, isu Industri dan isu kurangnya sejahteranya masyarakat. Ke depannya masyarakat Tuban akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang di dalamnya membutuhkan kemampuan dan kehebatan para pemuda dan masyarakat Tuban untuk menghadapinya. Kehebatan tehnologi informasi dan

perkembangan ekonomi menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda dan masyarakat Tuban ke depannya agar siap menghadapi semua permasalahan yang ada selama ini.

Disinilah ISNU Tuban harus hadir untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena niliai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik. Pluralisme yang ada di Tuban bisa menjadi salah satu indentitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang siap memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan keharmonisan di tengah kemajemukan.

ISNU sebagai oragnisasi NU yang bergerak di wilayah intelektual muda, sebgai cendikiawan muda NU peranan ISNU sangat penting dan strategis hadir dan kontinyuitas untuk membangun perubahan dalam tubuh Nahdliyin secara khusus dan membangun perubahan untuk bangsa dan Negara secara umum. Karena ISNU di isi oleh kaum muda, memandang masa muda adalah waktu yang sangat mahal dan menentukan arah dan kemanfaatan untuk kemajuan Negara. Kehilangan masa muda sama artinya dengan kehilangan kemewahan subtansial kebahagian dalam hidup, oleh sebab itu ISNU sebagai gerbong Intelektual muda NU, cendikiawan NU jangan sampai tidak bergerak.

Kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari peran pemuda, yang mampu menempatkan isu-isu kemerdekaan sebagai isu penting. Keterlibatan kaum muda sangat dibutuhkan karena kaum muda masih mempunyai kekuatan potensi akal maupun fisik. Dengan begitu, proses konsolidasi antara pemuda sangat dibutuhkan.

Di sinilah pentingnya khidmat Ikatan Sarjana Nahdaltul Ulama untuk memelihara keberadaaanya dalam lingkungan keluarga besar NU dan bersama-sama dengan kaum Nahdliyin dalam menjaga NKRI. Kemampuan Intelektual ISNU sangat diperlukan untuk membuat perubahan dengan upaya membangun prinsip-pripsip wawasan kebangsaan dan memperkuat ideology pancasila perlu dibangun kembali bagi kaum muda. Pemuda dan masyarakat perlu mendapatkan porsi pendidikan dan wawasan kebangsaan supaya mereka mampu berinteraksi dengan semua golongan yang kemudiaan terciptakan perdamain antar manusia satu dengan yang lainnya. Maka menjaga NKRI menjadi harga bagi kita semua.

Bagian 9

TIRAKAT, *UPGRADING* DIRI ALA SANTRI

Oleh:

Ulfa Masfufah, M.A.

Beberapa minggu yang lalu penulis menjadi peserta salah satu forum yang diadakan oleh pengurus cabang NU. Pada salah satu materi, instruktur menyebutkan bahwa orang-orang NU baik kultural maupun struktural mempunyai ciri yang hampir sama yaitu *ngalah*, sehingga terkadang kerap kali harus *ngalih*. Ketika tidak dalam keadaan terdesak orang NU akan selalu berusaha memaklumi. Hal ini yang menjadi latar belakang munculnya tulisan ini.

Stress related growth (SRG) merupakan salah satu teori psikologi khususnya psikologi perkembangan. Teori ini menyebutkan bahwa tidak hanya output negatif yang tumbuh pada diri seseorang dalam keadaan tertekan tetapi juga output positif. Output ini termasuk di dalamnya pemahaman diri, dan nilai-nilai yang termanifestasikan lewat perilaku. Selama ini

keadaan yang penuh dengan tekanan identik dengan munculnya *simptom-simptom* kecemasan bahkan hingga depresi (Lafreneire, 2000). Justru sebaliknya, berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan munculnya output positif. Di antara hasil penelitian tersebut menunjukkan meningkatnya harga diri, Popa & Podeab (2013), dan daya tahan atau ketabahan (Salim, Wadey, & Diss, 2015).

Stress related growth adalah pertumbuhan sebagai efek positif dari ketertekanan. Schaefer dan Moos (1992) menguraikan tiga jenis output positif dari stres yaitu: a) peningkatan sumber daya sosial atau peningkatan hubungan sosial baik dengan teman maupun yang sifatnya perluasan jaringan sosial, b) peningkatan konsep-diri dan filosofi hidup dan c) peningkatan kemampuan koping misalnya fokus pada strategi koping yang aktif.

Ketertekanan banyak kita temukan dalam pesantren. Dalam dunia pesantren dikenal terminologi tirakat, tirakat menurut KBBI mempunyai arti menahan hawa nafsu seperti berpuasa dan berpantang, arti yang lain adalah mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tirakat dalam konteks hidup di pondok pesantren misalnya keterbatasan makanan, banyaknya kegiatan sehingga terbatasnya waktu istirahat yang biasanya hanya berkisar 3-5 jam dalam sehari-semalam, termasuk penggunaan teknologi khususnya *smartphone*.

Keterbatasan, secara naluriah pada sebagian besar manusia akan menimbulkan rasa tertekan tapi, keterbatasan dalam pesantren justru melahirkan output yang luar biasa, banyak sekali ulama-ulama besar dan tokoh nasional dengan pemikiran luas dari mulai zaman pra kemerdekaan hingga saat ini lahir dari pesantren. Contohnya adalah pendiri NU KH.

Hasyim Asy'ari, hingga presiden ke empat yaitu KH. Aburrahman Wahid, yang masih bisa kita jumpai saat ini menteri Agama kabinet kerja Lukman Hakim Saifuddin dan banyak lagi yang lain, beliau-beliau ini lahir dari kultur pendidikan pesantren.

Tiga jenis output positif dari ketertekanan sebagaimana yang disampaikan oleh Schaefer dan Moos (1992) poin pertama yaitu: peningkatan sumber daya sosial baik yang sifatnya peningkatan hubungan maupun perluasan jaringan sosial. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang akan cenderung merevisi baik secara fisik berupa perilaku hingga visi kehidupannya dengan orang di sekelilingnya sebagai kompensasi penguatan diri. Poin kedua yaitu peningkatan konsep-diri dan filosofi hidup. Fiktor Frankl, seorang eksistensialis yang melahirkan Logoterapi dan terkenal dengan bukunya "man search for meaning" menyebutkan bahwa kecenderungan manusia akan mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih dalam, dalam keadaanya yang penuh tekanan. Contoh yang lain individu yang mampu melahirkan karya momumental sarat dengan nilai adalah Pramoedya Ananta Toer dengan novel-novelnya, dan yang belum lekang dari ingatan kita adalah tulisan-tulisan Gus Dur di Kolom Gusdur selama masa Orde Baru. Poin terakhir yaitu: peningkatan kemampuan koping. Beberapa penelitian secara khusus menghubungakan *SRG* dengan *coping strategies*, kalau penulis membahasakan secara sederhana kreatifitas dalam keterbatasan. Hal ini sebuah keniscayaan bahwa sesungguhnya yang tumbuh pada diri manusia mengikuti hukum *survive* yaitu senyatanya manusia mempunyai naluri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu meskipun secara fisik manusia adalah makhluk paling lemah tapi dengan keutamaan yaitu akalnya, manusia bahkan mampu

memanipulasi makhluk terkuat di jagat bumi ini, salah satu bentuknya adalah mencari penyelesaian atas masalahnya.

Implikasi teori *Stress-Related Growth* dalam pendidikan formal menurut penulis bahwa, secara fisik seorang pembelajar tidak harus berada pada puncak kenyamanan. Misalnya ruang kelas ber-AC, gizi yang cukup, dan kebutuhan akomodasi lainnya. Tapi, kembali pada poin penting pendidikan yaitu memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya dan pemahaman atas pengalaman tersebut pada pembelajar bagaimana menghadapi masalah. Harapannya, pembelajar tersebut menjadi pribadi yang tangguh baik secara fisik maupun prinsip dan nilai luhur untuk sampai pada tujuan kehidupan. Sehingga adanya keterbatasan tidak perlu diresahkan secara berlebihan khususnya ketika individu sedang berproses. Tertinggal secara fisik tidak melazimkan ketertinggalan secara kualitas.

Bacaan:

Dolbier, C.L., Smith, S.E., & Mary A. *Correlates and Change Following a Resilience Intervention 1-28.*

Lafreneire, P.J., 2000. *Emotional Development a biosocisl perspective*. Wadsworth Thomson Learning: USA

Popa, G. S., & Podeab, D. M. (2013). Stress-Related Growth, Self-esteem and Perceived Self-efficacyamong Professional Rescuers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences (89) 720-724.*

Schaefer, J. & Moos, R. (1992). Life Crises and personal growth. In B. Carpenter (Ed.). *Personal coping: Theory, research and application 149-170.*

Salim, J., Wadey, R., & Diss, C., 2015. Examining the relationship between hardiness and perceived stressrelated growth in a sport injury context. *Psychology of Sport and Exercise (19) 10-17.*

Bagian 10

ISENG-ISENG NU

Oleh:

Amrullah Ali Moebin, S.Pd.I., M.I.Kom.

Lampu kamar saya sedang mendrip-mendrip. Kemudian, byar pet. Setelah itu lampu padam. Saya keluar kamar lantas pergi ke warung klontong samping rumah untuk membeli lampu baru. Sepertinya lampu kamar putus.

Selanjutnya proses penggantian bola lampu lama ke bola lampu baru. Setelah beres saya melanjutkan aktivitas lagi. Proses mengganti lampu memang sangat mudah. Memutarnya hingga lepas dari tempatnya. Lalu menggantinya.

Namun, bukan berarti pekerjaan mudah ini bisa dilakukan setiap orang. Bahkan, sarjana. Ini soal mudah hanya mengganti bola lampu yang telah padam. Kadang, sarjana yang otaknya dipenuhi teori tak bisa menuntaskan pekerjaan sepele itu.

Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang teman. Dia sudah berkeluarga saat lampu di rumahnya padam, orang lain

yang dipanggil untuk membantu mengganti bola lampu. Padahal, kata kawan saya, saat masih usia sekolah dia cukup lihai dalam mengganti bola lampu. Apa gegara lama di kampus hingga kemampuan dasar mengganti lampu saja luntur.

Sebenarnya, bukan soal kemampuan mengganti lampu saja yang hilang dari mereka yang telah bergelar sarjana. Namun, mental merawat musala juga hilang. Ada cerita kawan saya yang lain tentang sifat musalaisme yang hilang.

Dulu, saat masih madrasah nyaris setiap hari musala menjadi tempat dia berteduh. Bahkan, azan menjadi ritual wajib saat magrib. Setelah salat jamaah, mengajar ngaji anak-anak kecil menjadi kebahagian tersendiri. Dilanjut salat isya'. Kemudian pulang dari musala.

Kebiasaan ini tiba-tiba luntur saat sudah berada di kampus. Sebab, di kampus bukan digodok menjadi manusia untuk manusia. Melainkan manusia untuk perusahaan. Ini persoalan penting di kurikulum kampus. Sebab, manusia yang telah mengenyam pendidikan di kampus justru saat kembali ke rumah jauh dengan rihuk pikuk musala.

Bukan saja kampus. Organisasi pergerakan sekalipun telah menggerse mental musalaisme. Mereka cenderung 'isin' saat lulus sarjana hanya menjadi imam musala atau jamaah di musala. Padahal, dulu dia adalah aktivis musala.

Ini memang ironis. Tapi, fakta ini sudah ada di mana-mana.

Menjadi sarjana memang berat. Apalagi dianggap tak memiliki pekerjaan. Tapi, sejatinya itu bukan persoalan. Sebab,

sebagai sarjana bukan harus bekerja. Melainkan menjadi orang yang bermanfaat jauh lebih penting ketimbang bekerja pada industri perusak lingkungan. Silakan saja diprotes tidak masalah. Bagi saya, lebih lebih terhormat seorang sarjana yang membuat rumah baca di rumah lantas ngopeni musala. Ketimbang menjadi buruh kapitalisme. Maaf kalau saya terlalu menggebu-gebu.

Mari sekarang berpindah ke sarjana NU. Ini menjadi persoalan lain. Saya belum pernah survei seorang sarjana NU yang berani kembali ke kampung halamannya. Namun, bisa saja di cek di sekeliling anda. Ada tidak sarjana NU yang pulang ke rumah lantas berbuat untuk kampungnya.

Apalagi, ngramut musala. Jelas ini minim sekali meski saya tidak pernah melakukan survei. Rerata, semua sedang heboh dengan dunia politik dan hiruk pikuk bisnisnya. Tidak dibisa disalahkan. Menjadi sarjana memang tolak ukurnya adalah kerja di perusahaan apa.

Hadirnya organisasi Ikatan Sarjana NU perlu menjawab tantangan ini. Bukan berarti sarjana harus berpikir sundul langit tapi tidak pernah menginjak bumi. Seharusnya, mereka membumi untuk bisa membawa bersama-sama ke langit. Jika konsep berpikir seorang intelektual justru menjauhkan dari masyarakat sekitarnya. Lebih baik tidak usah menjadi intelektual itu sendiri.

Saya berpikir, sarjana NU bukan untuk menjadi pengamin setiap kebijakan penguasa. Atau sebagai pengembek pada perusahaan raksasa. Melainkan, jadilah sarjana NU yang tetap bisa berdampingan dengan Mbok Rah, Mak Kami, Lek Dekon, dan Pakde Rudi yang ada di desa-desa.

Sejatinya, ini bukan harapan yang muluk-muluk. Jika dilihat dari sejarah NU berdiri dengan semangat para petani. Di tengah-tengah kaum tani. Dengan napas para petani. Dan, ekonomi para petani.

Apakah sarjana NU mampu hidup berdampingan dengan mereka? Semua tinggal dilihat saja. Sekali lagi hidup berdampingan. Bukan bermaksud mengeka ploitir mereka.

Saya pernah mendapat cerita dari seorang kawan yang terlibat langsung dalam kongres pertama ISNU di Lamongan. Sejak awal para ilmuan NU ingin mensterilkan ISNU dari para aktivis politik. Namun, tampaknya gagal. Munculnya AMM sebagai ketua bukti jika intelektual masih saja kalah licin oleh para politisi.

Terlebih saat ini ketua ISNU Jatim cukup dekat dengan gubernur terpilih. Semoga ISNU bukan menjadi gerbong pengawalan saja. Melainkan, tetap menjadi mitra kritis agar kelak organisasi ini tetap mendapatkan ruang untuk menungkan gagasan. Bukan hanya mendapat intruksi saja.

Sekali lagi, berISNU bukan hanya iseng-iseng NU. Namun, seorang ilmuan punya tanggung jawab terhadap ilmu dan masyarakat di sekitarnya.

Jadi, berISNUlah dengan seperti para kiai merawat jamaahnya di musala. Dan, berjiwa petarung seperti Bung Mahbub pada masanya. Dan, bersikap pluralis seperti Gus Gur untuk menjawa bangsanya.

Bagian 11

ISNU, PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Oleh:
Devi Febriana, S.Pd.

Di era modernisasi saat ini, perempuan memiliki kesempatan yang sangat luas dalam mengasah potensi diri serta berperan dalam berbagai aspek yang dapat turut serta terlibat dalam pembangunan suatu Negara. Karena selain dalam dunia domestic perempuan juga dapat berkiprah dalam dunia luar seperti berorganisasi, berwirausaha, berpoitik dan lain sebagainya.

Helen Fisher ahli antropologi, penulis, sekaligus professor di Rutgers University, dalam sebuah riset yang ditulis dalam buku berjudul *The First Sex: The Natural Talents of and How They are Changing the World,* mengatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk mengubah dunia Fisher mengatakan perempuan memiliki karakter bawaan seperti pandai berkomunikasi, mampu membaca bahasa nonverbal. Perempuan juga dapat melakukan beberapa hal secara simultan atau multitasking. Selain itu perempuan juga mempunyai kemampuan untuk melakukan perencanaan jangka panjang, piawai dalam berjejaring, dan bernegosiasi. Serta memiliki kecenderungan untuk mencari solusi yang bukan kalah atau

menang melainkan *win-win solution* dan memimpin secara egaliter.

Meski kehadiran perempuan di berbagai aspek memberikan kontribusi yang baik, representasi perempuan di puncak saat ini masih sedikit. Contohnya dari 70 BUMN yang ditemukan profil Direksi pada situsnya dari 354 Direksi, yang diduduki oleh perempuan hanya 28 orang atau (7,9%). Pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo partisipasi perempuan jauh lebih baik, yaitu dari 34 Menter iada 8 orang menteri atau 23,5%, meningkat dari Era pemerintahan Presiden SBY. Di DPR, dari 560 anggota DPR RI periode 2014-2019, 97 orang diantaranya atau 17,3% adalah perempuan, hal tersebut sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki.

Walaupun saat ini perempuan sudah memiliki peran selain di dunia domestik, namun angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangatlah tinggi. Dari data Komnas Perempuan mencatat bahwa dari tahun ke tahun meningkat yaitu pada tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus, tahun 2017 tercatat 348.446. Kekerasan ini menjadi hal yang dapat menghambat kemajuan bagi perempuan.

Untuk itu, ISNU wajib untuk terlibat dalam menjawab semua tantangan tersebut, mengurangi angka kekerasan, berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan Indonesia serta mengisi ruang-ruang strategis untuk pembangunan Negara Indonesia.

Bacaan

Betti Alisjahbana, *PerempuanPemimpin*. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.

Maghdalena Sitorus dkk, *Perempuan Memimpin,* Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla dkk., Ulil Abshar, *Islam Liberal & Fundmental: Sebuah Pertarungan Wacana,* Yogjakarta: Elsaq Press, Cetakan VI, Juni 2007.

Abdullah dkk, M. Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkonektif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religious*, Jakarta:PSAP.

Aizid, Rizem, *Menguak Kontroversi-Kontroversi Sejarah Indonesia*, Yogjakarta: Saufa, Cetakan I, Maret 2014.

Alisjahbana, Betti, *PerempuanPemimpin*. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.

Azra, Ayumardi, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mellinium III,* (Jakarta: Kencana, 2012)

Azra, Azyumardi & Dina Afriyanti, *"Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society"*, Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity andIslamic Education Boston University, Cura (May, 6-7, 2005)

Azra, Azyumardi, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam,*Jakarta: Logos,1999.

Baso, Ahmad, *Pesantren Studis 4a Buku IV: Khittah Republik Kaum Santri dan Masa Depan Ilmu Politik Nusantara, Juz Pertama: Akar Historis dan Fondasi Normatif Imu Politik-Kenegaran Pesantren, Jaringan dan Pergerakannya Se-Nusantara Abad 17 dan 18*, Jakarta: Pustaka Afid, 2013.

Barbour, Ian G., *Juru Bicara Tuhan: antara Sain dan Agam*a, Bandung: Mizan, 2004.

Benda, H. J. (1972). *Continuity and Change in Southeast Asia, Collected Journal Articles of Harry J. Benda*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies.

Benda, J. (1999). *Pengkhianatan Kaum Cendikiawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bisri, Mustofa, *Agama Anugrah, Agama Manusia, Rembang*: Mata Air, Cetakan I, Agustus 2013.

Brunessen, Martin Van, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995

Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren,*Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya, 2000.

Dolbier, C.L., Smith, S.E., & Mary A. *Correlates and Change Following a Resilience Intervention 1-28*.

Esposito, John L, *Masa Depan Islam Antara Tantangan Kemajemukan Dan Benturan Dengan Barat, Bandung*, MIZAN, Cetakan I 2010.

Fajar, A Malik, "Sintesa Perguruan Tinggi Dan Pesantren Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif", dalam Mudjia Rahardjo (ed.), *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pembangunan,*Malang: Cendikia Paramulya,2002.

Ghofir, Jamal, *Piagam Madinah Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW*, Yogjakarta: Aura Pustaka, 2012.

Ghofir, Jamal, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah Pendiri dan Penggerak NU*, Yogjakarta, Aura Pustaka, Cetakan I, April 2012.

Gorski, Paul C., *Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations,* (New York: McGraw-Hill, 2005)

Gustomy, R. (2010). Menjinakkan Negara, Menundukkan Masyarakat: Menelusuri Jejak Strategi Kuasa PT Lapindo Brantas Inc. dalam Kasus Lumpur Panas di Sidoarjo. In H. Prasetia (Ed.), *Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo*. Depok: Yayasan Desantara.

Hamid, M, *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, Yogjakarta: Pustaka Marwa, Cetakan I, 2012.

Hasan, Noorhadi, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogjakarta: SUKA-Press Cetakan I, Januari 2012.

Jamas, Nurhayati*, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta : Rajawali Pers,2008.

Khoiriyah, *Islam & Logika Modern Mengupas Pemahaman Pembaharuan Islam*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, Cetakan II, 2012.

Kleden, I. (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.

Laksono, P. M. (2006). Asosiasi Ilmu-Ilmu Sosial. In V. R. Hadiz & D. Dhakidae (Eds.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (pp. 247–273). Jakarta: Equinox Publishing.

Lafreneire, P.J., 2000. *Emotional Development a biosocisl perspective*. Wadsworth Thomson Learning: USA

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung*: Mizan, Cetakan I, April 2008.

Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*Jakarta: Paramadina, 1997.

Matanasi, P. (2017). Kejamnya Penggusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan. Retrieved January 17, 2019, from https://tirto.id/kejamnya-penggusuran-warga-kedung-ombo-dengan-dalih-pembangunan-cBfv

Marzuki, Muhammada Murdiono, Miftahuddin, *Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf*, Laporan Penelitian Strategis Nasional TahunAnggaran 2010, UNY (2010).

Masjkur, Anhari, *Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan Pesantren*, Surabaya: Diantama, 2007.

Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada

Nurdin, Amin dan Abbas, Fauzi, *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: AMZA, Cetakan I Februari 2012.

Nizar, Samsul*, Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana,2008.

Nietzsche, F. W. (2003). *Beyond Good and Evil*. Penguin Classics.

Popa, G. S., & Podeab, D. M. (2013). Stress-Related Growth, Self-esteem and Perceived Self-efficacyamong Professional Rescuers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences (89) 720 – 724*.

Raharjo, M. Dawam, *Pesantren dan Pembaharuan,,* Jakarta: LP3ES, 1995.

RI., Departemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003

Said, E. W. (2018). *Peran Intelektual*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Samuel, H. (2010). *Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu dan LabSosio Universitas Indonesia.

Sitorus dkk, Maghdalena, *PerempuanMemimpin,* Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2014.

Srinivas, M. N. (2017). Hidup di Desa: Sumber Pemahaman bagi Ilmuwan Sosial. *Wacana*, *36*, 183–197.

Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20 : Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana, 2012.

Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,*Jakarta: LP3ES, 1989.

Sholeh, Khudori, *Pokok Pikiran tentang Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama dalam Intelektualisme Islam: Melacak Akar-akar Integrasi Ilmu dan Agama*, Malang: LKQS UIN Malang, 2007.

Suyatno, *Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Pendidikan Islam volume 2, Desember 2013.

Schaefer, J. & Moos, R. (1992). Life Crises and personal growth. In B. Carpenter (Ed.).*Personal coping: Theory, research and application 149 – 170.*

Salim, J., Wadey, R., &Diss, C., 2015. Examining the relationship between hardiness and perceived stressrelated growth in a sport injury context. *Psychology of Sport and Exercise (19) 10-17.*

Sholeh, Badrus, "'Pesantren, Peace Building And Empowerment': A Study OfCommunity Based Peace Building Initiative," Al-Ja>mi'ah, Vol. 43, No. 2, (2005/1426 H)

Suparta, H.M., Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1, Juni 2014

Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogjakarta: LKiS, Cetakan II, Januari 2010.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: DEMOCRACY Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Weber, Max, *Sosiologi Islam*, Diterjemah, Halim, Abdillah, Yogjakarta; IRCiSoD, Cetakan I, 2012.

Ya'cub, Muhammad, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Desa,*Bandung: Angkasa,1984.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul masail 1926-1999,* (LKiS: Yogyakarta) 2004.

Zubaedi, *Islam & Benturan Perdaban*, Jogjakarta: AR-Ruzz Media, Cetakan II, 2012.

Lampiran SK Sturktur PC ISNU Tuban



PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
Gedung PBNU II Lt. 3 Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 31922648 e-mail: penguruspusat@isnu.or.id website: www.isnu.or.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 17 /SK/PP-ISNU/I/2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS CABANG
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TUBAN
MASA KHIDMAT 2018-2022

Menimbang :
1) Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan;
2) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, diperlukan perangkat organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang;
3) Bahwa konferensi Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang untuk melaksanakan suksesi kepengurusan;
4) Bahwa PC ISNU Kabupaten TUBAN telah menyelenggarakan Konferensi Cabang sesuai dengan PD/PRT ISNU pada 24 November 2018.

Mengingat :
1) AD/ART NU
2) Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 27 Peraturan dasar ISNU;
3) Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22 dan pasal 41 Peraturan Rumah Tangga ISNU;

Memperhatikan :
1) Rapat Tim Formatur PC ISNU Kabupaten TUBAN pada 24 November 2018;
2) Surat PW ISNU JATIM No. 166/R-SK/PW-ISNU-JATIM/XIII/2018 Perihal Rekomendasi Penerbitan SK PC ISNU Kabupaten TUBAN tertanggal 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1) Susunan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten TUBAN Masa Khidmat 2018-2022 sebagaimana terlampir;
2) Memberikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab sebagai Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten TUBAN Masa Khidmat 2018-2022 sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU serta peraturan organisasi lainnya;
3) Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya;
4) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2018

PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA



Dr. ALI MASYKUR MUSA, M.Si., M.Hum	MUHAMMAD KHOLID SYEIRAZI, M.Si
Ketua Umum	Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth.
1. PC NU Kabupaten Tuban
2. PW ISNU Jawa Timur

Dari Kontemplasi Menuju Aksi || Mengapa Semua || Merangkul Umat || Menawan untuk Bangsa



PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Gedung PBNU II Lt. 3 Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 31922648 e-mail: penguruspusat@isnu.or.id website: www.isnu.or.id

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 17 /SK/PP-ISNU/I/2019
Tentang Penetapan Susunan Pengurus Cabang
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten TUBAN
Masa Khidmat 2018-2022

SUSUNAN PENGURUS
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TUBAN
MASA KHIDMAT 2018-2022

PELINDUNG
KH. KHOLILURROHMAN
KH. MUSTAIN SYUKUR

DEWAN PENASIHAT

H. FATHUL HUDA
H. NOOR NAHAR HUSEIN
Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
A.M. SHALAHUDDIN, SH., M.Pd

DEWAN AHLI

AHMAD ZAINI, S.Ag., M.Si
Dr. Ir. M. AMENAN

PENGURUS HARIAN

KETUA	**: WARIH SATRIA SETIAWAN, ST., MBA**
WAKIL KETUA	: AHMAD LUBAB, M.Si
WAKIL KETUA	: Dr. RM. ARMAYA MANGKUNEGARA, SH., MH
WAKIL KETUA	: FATKHURROHMAN, S.Pd.I
SEKRETARIS	**: DHANARDI UTOMO HARTANI, SP**
WAKIL SEKRETARIS	: SAIFUL MUSLIM, S.Pd.I
WAKIL SEKRETARIS	: KASDONO, S.Pd
WAKIL SEKRETARIS	: MUHAMMAD ROUF, S.Pd.I., M.Pd.I
BENDAHARA	**: SYAMSUL ARIFIN, S.STP**
WAKIL BENDAHARA	: RAHMAD FAUZAN, ST

SEKSI-SEKSI

INTERNAL, KEORGANISASIAN DAN SDM

KOORDINATOR	**: SUGIONO, ST**
ANGGOTA	: MUHAMMAD JAMALUDDIN, ST
	: AHMAD ISFUL FUADI, SH
	: M. MUNDZIR, SE., MA
	: M. MIFTAHUL HUDA, S.Pd
	: M. AINUL YAQIN, S.Ag., M.Pd.I
	: JOKO HADI PURNOMO, M.EI., M.Si
	: ACHMAD SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Pd
	: NURUL FAHMI, S.Pd

Dari Kontemplasi Menuju Aksi [] Mengapa Semua [] Merangkul Umat [] Menanam untuk Bangsa



PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
Gedung PBNU II Lt. 3 Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 31922648 e-mail: penguruspusat@isnu.or.id website: www.isnu.or.id

HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR	**: DONI YANU ARIANTO, S.Pd**
ANGGOTA	: ANANG SHOLIHIN, ST
	: ANDRI SAIFULLAH, SE
	: RICO WAHBUB AHLIDIN, ST
	: ABDUL MUNDLIR, S.Pd
	: KUNCORO BOWO TRIWAHYUDI, SE
	: MUHAMMAD ZUBAIDI, S.Pd
	: ACHMAD YANI, S.Pd.I

EKONOMI, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KOORDINATOR	**: RAHMAD AGUNG PRABOWO, ST**
ANGGOTA	: Dr. ALFI HARISWANTO, SAP., M.AP., MMG
	: ANTO WAHYUDI, ST
	: KRISNA BAYU ARIATMOKO, S.TP
	: ARIS SUTIKNO, S.Pd
	: HIDAYAT SAEFUDDIN, S.Pd
	: SAKA IMAN GREZICO
	: NUDI HAMO, S.Ag., SH
	: ALI BAHAR, S.Pd.I
	: AHMAD ROZIQI, S.Pd

SOSIAL, POLITIK DAN IDEOLOGI

KOORDINATOR	**: RACHMAD GUSTOMY, S.IP., M.I.P**
ANGGOTA	: RUMAJI, S.Pd
	: HENDRA TRI ARDIANTO, S.IP., MA
	: AMRULLAH ALI MOEBIN, S.Pd.I., M.I.Kom
	: MUTHOLIBIN , S.Pd.I
	: EDI EKA SETYAWAN, S.Hum
	: MUTTAMAKIN, S.Fil., MA
	: AHMAD ABU DARIN, S.Sos

RISET, TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

KOORDINATOR	**: HENRY NUR CAHYON, ST**
ANGGOTA	: DWI WAHYU SETIAWAN, ST
	: DENNY SUMAMA PUTRA, ST
	: SUDARMOKO, ST
	: YUSUF AMINUDDIN, S.PD.I., M.Pd
	: M. AGUS SYIFA', SE., S.Pd., MM
	: ABDUL WAHAB, S.Pd
	: M. ULIL ARHAM, S.Sos

POTENSI DAN PERANAN WANITA

KOORDINATOR	**: ULFA MASFUFAH, MA**
ANGGOTA	: ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd
	: LINDA TRIA SUMARNO, S.Pd
	: TITIK FATIMATUL ZAHRO, S,Pd
	: DEVI FEBRIANA, S.Pd
	: NISFU LAILATUS SA'ADAH, S.Pd



PENGURUS PUSAT

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Gedung PBNU II Lt. 3 Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 31922648 e-mail: penguruspusat@isnu.or.id website: www.isnu.or.id

: EKA MINKHATUL MAULA, S.Pd
: SUKARTI, S.Pd
: ILFA NUR UBAYYA, S.Hum

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2018

PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Dr. ALI MASYKUR MUSA, M.Si., M.Hum
Ketua Umum

MUHAMMAD KHOLID SYEIRAZI, M.Si
Sekretaris Umum

TENTANG PENULIS

1. **Warih Satria Setiawan, ST., MBA.,** lahir di Tuban, 17 Juli 1981. Pendidikan menengahnya di selesaikan di SMA Negeri 1 Tuban, Jawa Timur (1997–2000). Menyelesaikan S1–Teknik Sipil di Universitas Brawijaya, Malang (2000–2005) dan melanjutkan studi S2–Master of Business Administration (MBA), di Aalto University, Finlandia (2014-2015). Di samping pendidikan formal, ia juga memperdalam ilmu agamanya di Pesantren Nurul Anwar, Kel. Perbon, Tuban (1998–2000), dan Pesantren Al Hikam, Malang (2000–2004). Keahliannya meliputi bidang Management, Bisnis & Entrepreneurship, Konstruksi dan Pembangunan Proyek Infrastruktur, dan Pendidikan dan Pelatihan Profesi & Bisnis. Ia banyak aktif di beberapa organisasi, antara lain; Organisasi Santri Pesantren Al Hikam (2001–2004), Jabatan Terakhir: Ketua I. *Kedua,* Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, Univ. Brawijaya (2001–2003), Jabatan/Posisi: Div. Eksternal. *Ketiga,* Ikatan Alumni Pesantren Al Hikam, SAHABAT AL HIKAM (2017–sekarang), Jabatan/Posisi: Bendahara. *Keempat,* relawan SAHABAT KAMIL (Khofifah-Emil), Jawa Timur (2018), Jabatan/Posisi: Bendahara, dan terakhir Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU)–PW Jawa Timur (2018–sekarang), Posisi: Pengembangan Organisasi di Wilayah. Sekarang, mendapat amanah sebagai Ketua Cabang ISNU Kabupaten Tuban masa khidmat 2019-2024. Bisa

dihubungi di nomor telepon: 085945169001, atau lewat alamat email: warihsatria@gmail.com

2. **Dr. RM. Armaya Mangkunegara, SH., MH.,** adalah alumnus SMAN 1 Tuban. Setelah itu melanjutkan pendidikan tingginya di prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (lulus 2011), S2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (lulus 2012), dan resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas yang sama (lulus 2018). Selain itu pemuda yang akrab disapa Gus Maya ini telah mengikuti pendidikan profesi advokat pada tahun 2013. Sekarang menjadi pengelola Yayasan Pesantren Nurussalam Gomang Lajolor Singgahan Tuban, advokat pada lembaga bantuan hukum dan dosen di Universitas Sunan Bonang Tuban.

3. **Edi Eka Setiawan, S.Hum.,** lahir di Tuban 20 Desember 1994, lebih detailnya Dusun Karangrejo Desa Tegalrejo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Pendidikannya di mulai di SDN Tegalrejo III, kemudian SMP Nurul Huda Tegalrejo, setelah lulus SMP, ia hijrah dari kota wali menuju kota santri, Gresik. Melanjutkan pendidikannya di MA Mathlabul Huda Dukun Gresik. Setelah lulus MA, ia kembali hijrah dari kota santri menuju kota pahlawan. Masuk di IAIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang UINSA. Masuk di Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Di situlah ia mulai dijejali semua yang berbau sejarah. Dan lama-kelamaan akhirnya menyukai sejarah. *Tresno jalaron soko kepekso*. Ia telah menlis dua bah buku, sebuah buku sejarah *Mahbub Djunaidi dan Khittah Plus NU*, dan satu lagi novel sejarah *Pagi Berdarah Keli Kepet* bersama Andik Susanto. Untuk

menghubunginya bisa melalui alamat e-mail: mbamboenk12@ gmail.com atau Facebook Edy Eka Setiawan.

4. **Wawan Purwadi, S,Pd.I.,** lahir di Tuban 1 Januari 1988. Pendidikannya ditempuh di SDN Desa Dikir Kec. Tambakboyo, SMPN 2 Desa Mander Kec Tambakboyo, dan SMK Ma'arif 4-5 Desa Pabeyan Kec Tambakboyo. Sedangkan pendidikan tingginya ditempuh di STITMA Tuban dan merah gelar Sarjana Pendidikan Islam. Selama kuliah aktif sebagai pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) STITMA Tuban. Selain itu juga di organisasi ekstra mahasiswa komisariat PMII STITMA Tuban dan Pengurus Cabang PMII Tuban.

5. **Muhammad Rouf, M.Pd.I.,** lahir pada taggal 25 Maret 1989, ia adalah warga Dusun Banggel Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Alumnus MAN Tuban ini menyelesaikan S1 di IAIN (kini UIN) Sunan Ampel Surabaya dan S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain di bangku formal, ia juga sempat *ngaji* di Ponpes Darul Ulum Sambonggede Merakurak, Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, Pesantren An-Nur Surabaya dan Ma'had Umar bin Khattab Surabaya. Ia saat ini mengajar di perguruan tinggi dan mengelola penerbitan buku *Karya Litera Indonesia*. Penulis buku *Paradoks Sarjana* ini pernah aktif di PMII Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya dan di sela-sela kesibukan, ia dan teman-temannya melakukan banyak kegiatan di komunitas *Gerakan Tuban Menulis (GTM).*

6. **Hendra Try Ardianto, MA.,** adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang. Sebelum menjadi dosen, pernah bekerja sebagai jurnalis di METRO TV dalam program MATA NAJWA. Kesibukannya saat ini, selain mengajar dan meneliti, adalah *Editor in Chief* pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP). Telah menulis beberapa karya, baik buku, *chapter* buku, jurnal, serta artikel baik di media cetak dan elektronik.

7. **M. Yusuf Aminuddin, S.Pd.I., M.Pd.,** menyelesaikan S1 di IAIN (kini UIN) Sunan Ampel Surabaya, S2 di UNESA Srabaya dan S3 di IAIN Tulungagung. Semasa kuliah penulis pernah aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya, aktif dalam organisasi Republik Damai (REDAM) yang dibina oleh Prof. Dr. Hermawan Sulistiyo, MA. Ph.D (Calon Gubernur Jatim 2008) dan beberapa organisasi lainnya di dalam maupun diluar kampus. Penulis sekarang menjadi Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya dan STAI Al Hikmah Tuban. Juga menjabat sebagai Direktur *Madania Centre (MC)* sebuah konsultan Pendidikan satu-satunya di Kota Tuban, Mabincab PMII Tuban dan aktif di beberapa LSM *for research and Development.*

8. **Mutamakin, MA.,** menyelesaikan pendidikannya di MI Salafiyah Prambontergayang Soko Tuban, MTs Salafiyah Prambontergayang Soko Tuban dan KMI Darussalam Gontor (lulus thn 1992). Pendidikan Tingginya ditempuh di Fak. Filsafat UGM (S1, lulus thn 2000) dan S2 CRCS UGM (S2, lulus thn 2003), serta kini sedang menempuh S3 Pemikiran Islam UIN-Sunan Ampel Surabaya. Ia adalah dosen di STAIMA Al-Hikam Malang. Saat ini sdg

menyelesaikan alih aksara (transliterasi) kitab kuno Babad Tanah Jawi pegon (950 halaman).

9. **Mutholibin, S,Pd.I.,** ketika Mahasiswa aktif di PMII Independen, di mana ia pernah mengenyam kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta di Jurusan SKI, kemudian Gelar Sarjana PAI di peroleh di UIN Maulana Malik Ibrahim Kota Malang, Pernah juga Merasakan Pasca Sarjana UNISLA dan UNISDA. Karya tulis pertamanya berjudul *Mahasiswa! Revolusimu Belum Selesai*, sedangkan bukunya berikutnya adalah *Revolusi Mental: Soekarno:Nations and Charakter Building.* Sekarang sibuk sebagai tenaga pendidik di salah satu madrasah di Kota Tuban dan menjadi koordinator kegiatan literasi yang bernama *Gerakan Tuban Menulis (GTM).*

10. **Ulfa Masfufah, M.A.,** lahir di Tuban, 6 April 1990. Menyelesaikan pendidikan di SDN Jadi 2 Tuban, MTs Mambaus Sholihin Gresik, MA Mambaus Solihin Gresik. Pendidikan S1-nya diselesaikan di UIN Maliki Malang dan S2-nya ditempuh di UGM Yogyakarta. Ia sekarang berprofesi sebagai guru sebuah sekolah di Tuban dan mengajar sebagai dosen di STITMA Tuban.

11. **Amrullah AM., S.Pd.I., M.I.Kom.** adalah alumnus SMAN 2 Tuban, Menyelesaikan S1 UIN Maliki Malang dan S2 Ilmu Komunikasi UNITOMO Surabaya. Sekarang mengelola rumah baca *Masyarakat Bijaksana.*

12. **Devi Febriana, S.Pd.,** lahir di Tuban, 06 Februari 1992. Pendidikan dasarnya diselesaikan di SDN Kepohagung I, melanjutkan ke SMPN 1 Plumpang dan SMKN 2 Tuban.

Pendidikan tingginya juga diselesaikan di Tuban, yaitu di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (UNIROW). Skarang aktif sbagai pekerja sosial di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Tuban sebagai Koordinator Dewan kelompok Kepentingan. Adapun organisasi yang pernah diikti antara lain; Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karang Taruna Kabupaten Tuban (2017-2022), Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan (DKK) KoalisiPerempuan Indonesia (KPI) CabangTuban (2017-2020), Sekretaris III Korp. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) PKC PMII Jawa Timur (2015-2017), Divisi Humas KPI Cabang Tuban (2014-2016), Ketua Korp PergerakanMahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI)PC. PMII Tuban (2014-2015), Divisi Advokasi English Student Association (ESA) UNIROW Tuban (2013-2014), Pengurus Komisariat PMII Unirow (2012-2013), Divisi Social Economics (SOSEC) ESA UNIROW Tuban (2012-2013), Bendahara KOPSIS SMKN 2 Tuban (2008-2009), Ketua PMR SMPN 1 Plumpang (2005-2006) dan Pengurus OSIS Departemen Oranisasi Politik dan Kepemimpinan (2005-2006).

"Membawa ISNU pada jalurnya, yakni menghimpun kepentingan para intelektual, profesional, dan sarjana di lingkungan NU dengan meningkatkan kualitas sumber daya melalui pendidikan"

(Dr. H. Ali Masykur Musa, M.Hum—Ketua Umum PP ISNU)

"Agar ISNU dapat dapat dikatakan sebagai organisasi para sarjana yang sungguh-sngguh,maka cirri anggota ISNU adalah menulis, meneliti dan menguatkan bidang literasi di bidang yang ia geluti. Maka dapat dikatakan ISNU itu ya literasi itu sendiri."

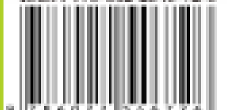
(Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM.—Keta Umum PW ISNU Jawa Timur)



CV. Karya Litera Indonesia
Jl. Sunan Kalijaga, Gang Kresna, Kelurahan Latsari
Kabupaten Tuban
Telp: 085730630854/085631185003
Facebook: Karya Litera Indonesia
Email: literaindonesia99@gmail.com

PC ISNU TUBAN





ISBN 978-602-2546-72-6